

**MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG KE INDONESIA MELALUI
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) DALAM
PROYEK PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERPADU (SKPT) PADA TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Program Studi Hubungan Internasional dengan Peminatan
Global Political Economy



Disusun Oleh:

Charisa Evangelista

155120401111028

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN
MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG KE INDONESIA MELALUI
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) DALAM
PROYEK PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERPADU (SKPT) TAHUN 2018

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Charisa Evangelista

155120401111028

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Aswin Ariyanto Aziz, S.IP, M.DevSt

Achmad Fathoni Kurniawan, S.IP,MA

NIP. 19780220201121001

NIK. 2009068201231001

Ketua Program Studi

Hubungan Internasional

Aswin Ariyamto Aziz, S.IP, M.DevSt

NIP. 19780220201121001

LEMBAR PENGESAHAN

**MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG KE INDONESIA MELALUI
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) DALAM
PROYEK PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERPADU (SKPT) PADA TAHUN 2018**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Charisa Evangelista

155120401111028

Telah diuji dan dinyatakan “LULUS” dalam ujian Skripsi

Pada tanggal 3 Januari 2020

Ketua Majelis Penguji,

Sekretaris Majelis Penguji,

Adhi Cahya F., S. Hub.Int., MS
NIK.

Reza Triarda, S.Sos., MA
NIK.

Anggota Majelis Penguji 1,

Anggota Majelis Penguji 2,

Aswin Ariyanto Aziz, S.IP., M. DevSt
NIK. 19780220201121001

Achmad Fathoni K, S.IP., MA
NIK. 2009068305212001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya

Prof.Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Charisa Evangelista

NIM : 155120401111028

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul

“MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG KE INDONESIA

MELALUI JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

DALAM PROYEK PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN

PERIKANAN TERPADU (SKPT) PADA TAHUN 2018” adalah benar-benar

hasil karya saya. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda

sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini saya siap

menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan

adanya pelanggaran terhadap etika penulisan dalam skripsi yang saya buat ini.

Malang, Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan,

Charisa Evangelista

NIM. 155120401111028

ABSTRAK

Judul Skripsi : Motif Bantuan Luar Negeri Jepang ke Indonesia Melalui
Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam Proyek
Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Tahun
2018

Jepang merupakan salah satu negara anggota DAC (*Development Assistance Committe*) yang memberikan bantuan luar negeri kepada banyak negara dan negara di kawasan Asia yang menjadi prioritas utama penerima bantuan ODA Jepang, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap berharga bagi Jepang dikarenakan letak geografisnya yang berada dijalur perlintasan perdagangan industri dan ekonomi Jepang, China dan Korea dengan beberapa negara di kawasan Asia. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara maritim yang kaya akan hasil produksi lautnya. Sebagai negara pengimpor utama hasil laut Indonesia khususnya pada hasil ikan tuna nya, Jepang sangat bergantung pada hasil laut Indonesia. Dalam pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan Jepang melalui JICA pada proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Indonesia pada tahun 2018, penulis melihat adanya kepentingan tersendiri yang hendak dicapai oleh Jepang dalam pemberian bantuan luar negeri tersebut. Sehingga penelitian penulis ini bertujuan untuk mencari tahu apa motif bantuan luar negeri Jepang melalui JICA ke Indonesia dalam proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

pada tahun 2018 dengan menggunakan konsep motif bantuan luar negeri milik David Sogge, yang terdapat 3 variabel motif di dalamnya :

Sociopolitical Motives, Mercantile Motives, Humanitarian Motives.

Kata Kunci : Jepang, Indonesia, Proyek Pembangunan SKPT.



ABSTRACT

Thesis Title: Motive of Japanese Foreign Assistance to Indonesia through the Japan International Cooperation Agency (JICA) in the Integrated Marine and Fisheries Centers Development Project (SKPT) in 2018

Japan is a member of the DAC (Development Assistance Committee) which provides foreign assistance to many countries and countries in Asia which are the top priority recipients of Japanese ODA assistance, one of which is Indonesia. Indonesia is one of the countries considered valuable to Japan because of its geographical location on the path of the industrial and economic trade crossings of Japan, China and Korea with several countries in the Asian region. In addition, Indonesia is also one of the maritime countries that is rich in marine products. As a major importer of Indonesian marine products, especially tuna, Japan is very dependent on Indonesian marine products. In the provision of foreign aid by Japan through JICA on the development project of the Indonesian Center for Integrated Marine and Fisheries (SKPT) in 2018, the authors see a special interest to be achieved by Japan in the provision of foreign assistance. So that this research writer aims to find out what the motives of Japanese foreign aid through JICA to Indonesia in the development project of the Center for Marine and Fisheries Integrated (SKPT) in 2018 by using the concept of foreign aid motives belonging to David Sogge, which has 3 motive variables in it : Sociopolitical Motives, Mercantile Motives, Humanitarian Motives.

Keywords: Japan, Indonesia, SKPT Development Project.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....	14
2.1 Studi Terdahulu.....	14
2.2 Kerangka Konseptual.....	21
2.3 Definisi Operasional.....	32
2.4 Alur Pemikiran.....	41
2.5 Argumen Utama.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.4 Teknik Analisis Data.....	45
3.5 Sistematika Penulisan.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	48
4.1 Sejarah Bantuan Luar Negeri Jepang.....	48
4.2 Bantuan Luar Negeri Jepang di Indonesia.....	53



4.3 Bantuan Jepang dalam Proyek Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Tahun 2018 61

BAB V PEMBAHASAN 70

5.1 Motif Bantuan Luar Negeri 70

5.1.1 *Socio-political Motives* 71

5.1.2 *Mercantile Motives* 82

5.1.3 *Humanitarian Motives* 92

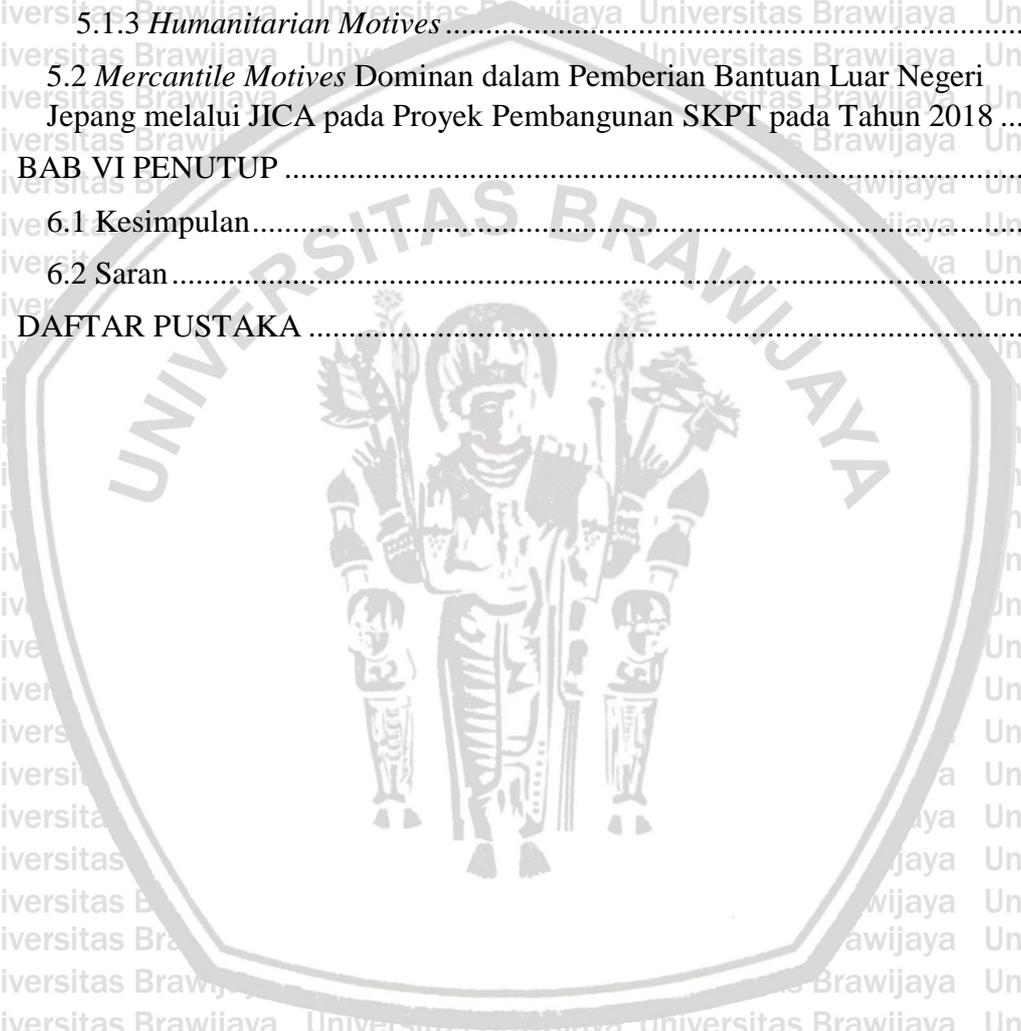
5.2 *Mercantile Motives* Dominan dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri Jepang melalui JICA pada Proyek Pembangunan SKPT pada Tahun 2018 94

BAB VI PENUTUP 97

6.1 Kesimpulan 97

6.2 Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 *Types of Japan ODA*.....3

Gambar 1.2 *Donor Countries by Region*.....4

Gambar 1.3 *Japan’s Bilateral ODA by Region*.....5

Gambar 1.4 *Japan’s Assistance in the East Asia Region*.....7

Gambar 4.1 *Tren Bantuan Jepang di Indonesia*.....55

Gambar 4.2 *Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia*.....64

Gambar 4.3 *SKPT Prioritas 2017*.....68

Gambar 5.1 *Sasaran, Indikator, dan Target Narasi RPJMN 2020-2024*.....74

Gambar 5.2 *Sasaran, Indikator, dan Target Narasi RPJMN 2020-2024*.....76

Gambar 5.3 *Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024*.....77

Gambar 5.4 *Total dan nilai Hasil Perikanan Indonesia*.....83

Gambar 5.5 *Total Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia ke Jepang tahun 2018*.....85

Gambar 5.6 *Neraca Perdagangan Komoditas Ikan Jepang tahun 2013-2017*.....87

Gambar 5.7 *Negara Mitra Utama Impor Hasil Perikanan Jepang*.....88

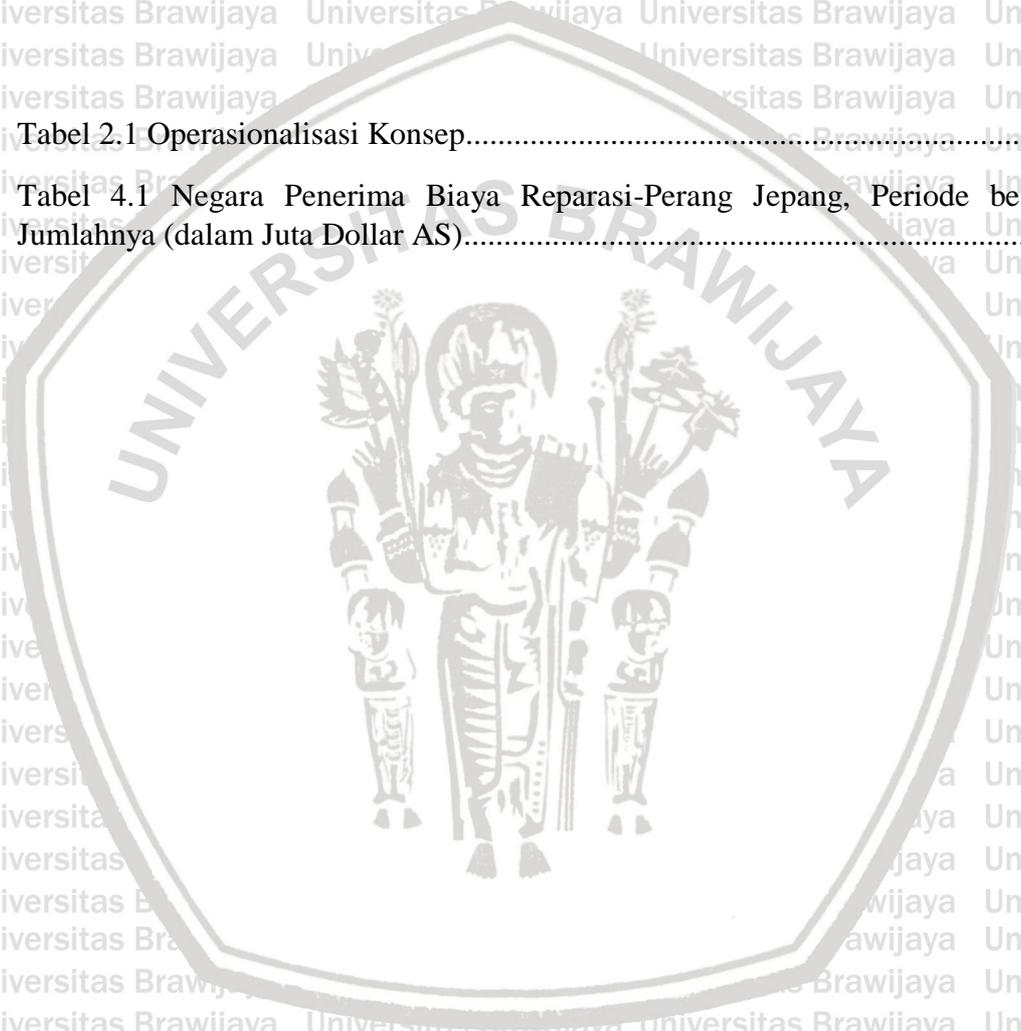
Gambar 5.8 *Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama Periode Januari-November 2012-2017*.....89





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep.....	37
Tabel 4.1 Negara Penerima Biaya Reparasi-Perang Jepang, Periode beserta Jumlahnya (dalam Juta Dollar AS).....	50



DAFTAR SINGKATAN

- AMF : *Asian Monetary Fund*
- DAC : *Development Assistance Committee*
- FDI : *Foreign Direct Investment*
- IMF : *International Monetary Fund*
- JICA : *Japan International Cooperation Agency*
- KKP : *Kementrian Kelautan dan Perikanan RI*
- LCS : *Laut Cina Selatan*
- NGO : *Non-governmental Organizations*
- OA : *Official Assistance*
- ODA : *Official Development Assistance*
- OECD : *Organization for Economic Cooperation and Development*
- OECF : *Overseas Economic Cooperation Fund*
- OTCA : *Overseas Technical Cooperation Agency*
- PVA : *Private Voluntary Assistance*
- SKPT : *Sentra Kelautan dan Perikanan*
- UN : *United Nations*
- WPP : *Wilayah Pengelolaan Perikanan*



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan luar negeri sudah ada sejak abad ke 18 sebelum adanya perang dunia kedua. Bantuan luar negeri pertama kali terlihat ketika Prusia memberikan bantuan luar negeri kepada sekutunya. Di era modern pasca terjadinya perang dunia kedua, kegiatan bantuan luar negeri muncul melalui program yang dimiliki oleh Amerika yaitu *Marshall Plan* yang mempunyai tujuan untuk membantu perekonomian 17 negara di Eropa Barat dan Eropa Selatan.¹ Keberhasilan program *Marshall Plan* menjadikan program ini semakin diperluas secara universal dan menjadikan terbentuknya beberapa lembaga luar negeri seperti *United Nations* (UN), *International Monetary Fund* (IMF), dan *World Bank* yang mempunyai peran penting dalam pengalokasian bantuan luar negeri, menentukan kualifikasi penerimaan bantuan, dan menilai dampak bantuan.²

Bantuan luar negeri merupakan salah satu fenomena dalam kajian Hubungan Internasional, yakni sebagai instrumen ekonomi politik suatu negara. *Development Assistance Committee* (DAC) dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai sebuah pinjaman dan hibah yang berasal dari sektor publik yang diberikan untuk tujuan membantu memperbaiki perekonomian suatu

¹ Victoria Williams, *Foreign Aid*, Encyclopedia Britanica, diakses dari <https://www.britanica.com/topic/foreign-aid> pada 9 Juli 2019

² *Ibid.*

negara dengan minimal 25 persen dari bantuan tersebut berbentuk hibah.³

Bantuan luar negeri diklasifikasikan oleh DAC dalam tiga model, yaitu:

Official Development Assistance (ODA), *Official Assistance* (OA), dan

Private Voluntary Assistance (PVA). ODA didefinisikan sebagai bantuan

yang diberikan pemerintah kepada negara *low-income* dan *middle income*.

OA didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada

negara yang berpenghasilan sekitar 9.000 Dollar AS dan negara bekas Uni

Soviet. Sedangkan PVA merupakan bantuan luar negeri yang diberikan oleh

NGO (*Non-governmental Organization*).⁴

OECD mendefinisikan *Official Development Assistance* (ODA) sebagai

bantuan pemerintah untuk mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan

negara berkembang. ODA merupakan bantuan yang diberikan oleh negara

donor kepada negara penerima baik secara bilateral atau melalui *multilateral*

development agency seperti UN atau *World Bank*.⁵ ODA didefinisikan oleh

Japan International Cooperation Agency (JICA) secara luas sebagai bantuan

bilateral yang diberikan secara langsung kepada negara berkembang atau

bantuan multilateral yang diberikan melalui lembaga internasional.

Kerjasama bilateral tersebut terdiri dari kerjasama keuangan dan investasi,

yaitu pinjaman ODA dan investasi di sektor swasta dan *grant*, yaitu bantuan

hibah dan kerjasama teknis.

³ Jean Philippe Therien, 2002, *Debating Foreign Aid: Right Versus Left*, London: Taylor and Francis Ltd., hlm 446-466

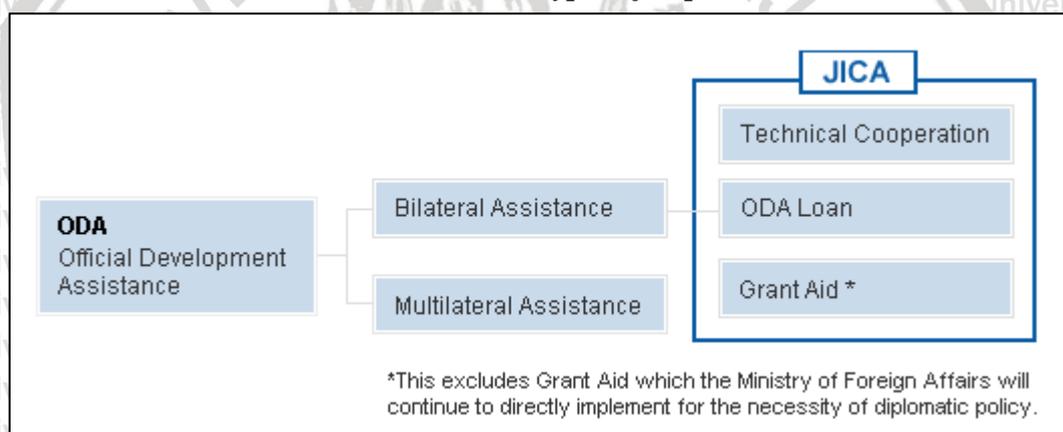
⁴ Guljinder Kaur Randhawa, *Foreign Aid in Economic Development*, diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/083f/679c8dcd08096b337621fb86d3c183a05961.pdf> pada 9 Juli 2019, hlm. 2

⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Net ODA*, diakses dari <https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm> pada 9 Juli 2019

Jepang merupakan salah satu anggota dari DAC bersama Inggris, Perancis, Amerika, dan Jerman.⁶ Sebagai bagian dari DAC, Jepang memberikan bantuan luar negeri baik secara bilateral atau multilateral melalui ODA. ODA

Jepang memiliki lima tipe bantuan, yaitu: *Technical Cooperation*, *Grant*, *ODA Loan*, *Private Sector Investment Finance*, dan *Multilateral Aid*.⁷ Semua itu diberikan melalui JICA sebagai lembaga resmi pemerintah Jepang dalam penyaluran bantuan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 *Types of Japan ODA*



Sumber: *Website JICA*⁸

Sebagai salah satu negara donor, Jepang mempunyai tujuan untuk mengatasi isu-isu pembangunan dan meningkatkan hubungan agar semakin erat dengan negara penerimanya. Tujuan pemberian bantuan luar negeri

⁶ Homi Kharas, 2008, *The new reality of Aid*, Washington DC: Brooking Institution Press, hlm. 55

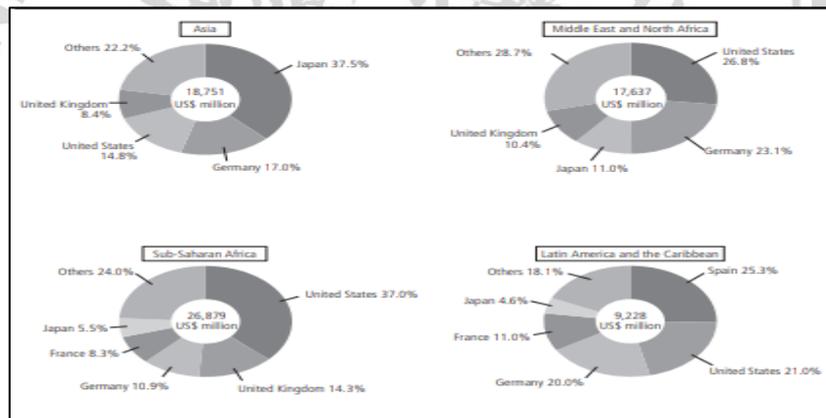
⁷ Japan International Cooperation Agency, *Official Development Assistance Loans: Official Development Assistance (ODA) and ODA Loans*, diakses dari https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/overseas/index.html pada 9 Juli 2019

⁸ Japan International Cooperation Agency, *Japan's ODA and JICA*, diakses dari <https://www.jica.go.jp/english/about/oda/index.html> pada 9 Juli 2019

Jepang sesuai prinsip dasar pemberian bantuan luar negeri yang terdapat dalam *Japan's ODA Charter* yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan pembangunan komunitas internasional serta menjamin adanya kemakmuran dan keamanan untuk Jepang.⁹

Jepang memberikan bantuan luar negeri ke berbagai wilayah di dunia, seperti Asia, Sub-Saharan Africa, Oceania, Middle East, North Africa, Latin America and The Caribbean, Europa, dan Assistance Ecompassing Multiple Region.¹⁰ Diantara wilayah di dunia tersebut yang menjadi prioritas dalam pengalokasian dana adalah Asia. Hal ini dapat terlihat pada gambar di bawah ini yang mana Jepang menjadi negara donor terbesar di Asia.

Gambar 1.2 Donor Countries by Region



Sumber: MOFA Japan 2017, *White Paper on Development 2017*¹¹

⁹ Government of Japan Ministry of Foreign Affairs Economic Co-operation Bureau, *Japan's ODA Charter*, diakses dari <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf> pada 9 Juli 2019, hlm. 1

¹⁰ Ministry of Foreign Affairs Japan, 2017, *White Paper on Development Cooperation: Japan's International Cooperation*, diakses dari <https://www.mofa.go.jp/files/000406627.pdf>, pada 9 Juli 2019, hlm. iii

¹¹ *Ibid*,



Gambar 1.3 Japan's Bilateral ODA by Region

Chart 1-7 Japan's Bilateral ODA by Region (2016) (Unit: US\$ million)

Region	Grants		Loan aid				Net disbursement		Gross disbursement			
	Grant aid	Technical cooperation	Total	Amount disbursed (A)	Amount recovered (B)	(A)- (B)	Total	Change from the previous year (%)	Total	Percentage of total (%)	Change from the previous year (%)	
												Grants provided through multilateral institutions
	Type											
Asia	610.29	137.37	673.09	1,283.39	5,754.40	5,250.18	504.22	1,787.61	9.9	7,037.79	52.3	11.1
East Asia	384.56	52.13	459.90	844.45	2,876.20	3,983.18	-1,106.98	-262.52	-336.3	3,720.66	27.7	5.3
Northwest Asia	9.70	0.09	30.47	40.17	179.31	993.26	-813.95	-773.78	-17.3	219.48	1.6	-13.0
Southeast Asia	374.03	51.21	425.11	799.14	2,696.89	2,989.92	-293.03	506.11	-14.1	3,496.03	26.0	6.9
South Asia	135.78	31.51	171.57	307.35	2,607.79	1,163.70	1,444.10	1,751.45	20.9	2,915.14	21.7	18.2
Central Asia and the Caucasus	46.25	10.69	28.30	74.54	252.53	103.31	149.22	223.77	7.2	327.07	2.4	7.9
ODA for multiple countries in Asia	43.71	43.05	13.33	57.04	17.87	—	17.87	74.91	160.9	74.91	0.6	160.9
Middle East and North Africa	687.85	595.52	125.60	813.45	1,131.23	656.83	474.41	1,287.86	40.1	1,944.69	14.5	36.9
Sub-Saharan Africa	688.69	367.35	397.05	1,085.75	404.32	101.39	302.93	1,388.68	-23.2	1,490.07	11.1	-21.0
Latin America and the Caribbean	118.29	14.90	165.30	283.59	145.35	346.55	-201.19	82.39	592.8	428.94	3.2	-2.0
Oceania	80.48	2.03	47.65	128.13	52.64	17.80	34.84	162.97	46.0	180.77	1.3	40.0
Europe	13.95	8.67	17.94	31.90	370.16	66.00	304.17	336.06	598.4	402.06	3.0	259.7
Assistance encompassing multiple regions	612.75	474.46	1,350.93	1,963.68	2.76	—	2.76	1,966.44	16.1	1,966.44	14.6	16.1
Total	2,812.31	1,690.30	2,777.57	5,589.88	7,860.87	6,438.74	1,422.13	7,812.01	14.3	13,458.75	100.0	12.0

Sumber: MOFA Japan 2017, *White Paper on Development 2017*¹²

Dari tabel diatas tersebut, dapat terlihat hingga tahun 2016 Asia masih menjadi prioritas utama penerima bantuan luar negeri Jepang. Salah satu regional di Asia yang menjadi prioritas adalah Asia Tenggara. Negara di kawasan Asia Tenggara yang menerima bantuan luar negeri Jepang adalah Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, Myanmar, Vietnam,

¹² Ibid,



Brunei Darussalam, dan Singapura.¹³ Dalam penelitian ini penulis fokus pada salah satu negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia.

Indonesia merupakan negara penting bagi Jepang untuk menjalin kerjasama. Sebagai salah satu negara maritim yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Asia, Indonesia menjadi penting dikarenakan letak geografis nya yang berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang menjadikan Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, antara lain perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya antara Jepang, Korea, dan RRC dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa.¹⁴

Bantuan dari pemerintah Jepang ke Indonesia dimulai sejak berakhirnya periode kolonialisasi Jepang, yang mana bantuan yang diberikan Jepang ini sebagai upaya rekonstruksi 'image' negara mereka pasca perang dunia kedua. Seiring berjalannya waktu, ODA semakin aktif dalam memberikan bantuan luar negeri nya kepada negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia.

¹³ Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Japan's ODA Data by Country*, diakses dari <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/data/index.html> pada 10 Juli 2019

¹⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Geografi*, diakses dari <https://kemlu.go.id/astana/id/pages/geografi/41/etc-menu> pada 22 November 2019

Gambar 1.4 Japan's Assistance in the East Asia Region

Chart III-8 Japan's Assistance in the East Asia Region

Calendar year: 2016 (Unit: US\$ million)

Rank	Country or region	Grants			Total	Loan aid			Total (Net disbursement)	Total (Gross disbursement)
		Grant aid		Technical cooperation		Amount disbursed (A)	Amount recovered (B)	(A)-(B)		
		Grants provided through multilateral institutions								
1	Viet Nam	9.28	2.76	95.47	104.75	1,478.72	417.41	1,061.32	1,166.06	1,583.47
2	Myanmar	209.58	37.90	97.96	307.54	199.28	—	199.28	506.82	506.82
3	Thailand	11.10	0.02	24.77	35.87	378.18	302.39	75.79	111.66	414.05
4	Indonesia	7.67	—	59.79	67.46	332.46	1,606.26	-1,273.80	-1,206.34	399.92
5	Philippines	20.64	0.05	61.70	82.34	219.17	512.11	-292.95	-210.60	301.51
6	Mongolia	8.72	0.09	24.36	33.08	158.35	16.14	142.20	175.28	191.43
7	Cambodia	76.04	3.14	33.24	109.28	31.64	4.92	26.72	136.00	140.92
8	Laos	16.62	—	30.35	46.97	16.81	4.97	11.83	58.80	63.77
9	Malaysia	0.05	—	12.08	12.13	35.33	141.85	-106.51	-94.38	47.46
10	Timor-Leste	21.99	6.27	9.43	31.42	5.29	—	5.29	36.71	36.71
11	China	0.98	—	6.03	7.01	20.97	977.12	-956.15	-949.15	27.97
	Multiple countries in East Asia	0.82	0.82	4.32	5.15	—	—	—	5.15	5.15
	East Asia region total	384.56	52.13	459.90	844.45	2,876.20	3,983.18	-1,106.98	-262.52	3,720.66
	(ASEAN total)	352.04	44.95	415.68	767.72	2,691.60	2,989.92	-298.32	469.40	3,459.32

Notes:

- Ranking is based on gross disbursements.
- Due to rounding, the total may not match the sum of each number.
- [—] indicates that no assistance was provided.
- Grant aid includes aid provided through multilateral institutions that can be classified by country.
- Aid for multiple countries is aid in the form of seminars or survey team dispatches, etc. that spans over multiple countries within a region.
- Country or region shows DAC recipients but including graduated countries in total.
- Disbursements under "Multiple countries in East Asia" utilize figures based on the OECD-DAC criteria, and therefore, do not include disbursements for multiple countries, including Myanmar.
- Negative numbers appear when the recovered amount of loans, etc. exceeds the disbursed amount.

Sumber: MOFA Japan 2017¹⁵

Dari gambar diatas tersebut, dapat terlihat bahwa Indonesia merupakan negara peringkat ke-4 yang menerima bantuan luar negeri Jepang, setelah negara Vietnam, Myanmar, dan Thailand.

Hubungan kerjasama sosial-ekonomi antara Jepang dan Indonesia pertama kalinya adalah pada proyek pembangunan industri elektronik di Indonesia dan dibarengi juga dengan masuknya arus gelombang migrasi Jepang ke Indonesia. Sampai saat ini jalinan hubungan antara Jepang dan Indonesia telah berjalan dengan baik dan harmonis. Kerjasama yang dilakukan oleh

¹⁵ *Op. Cit.*, Ministry of Foreign Affairs Japan, hlm. 103



kedua negara tersebut tidak hanya pada bidang ekonomi saja, namun pada bidang-bidang lainnya, seperti sosial-kemanusiaan.

Selain itu hubungan antara Jepang dan Indonesia juga terjadi dalam sektor kemaritiman yang mana ditandai dengan ditandatanganinya *Exchanges of Notes on the Integrated Marine and Fisheries Centers and Fish Market* pada 25 Juni 2018 dalam kerjasama maritim antara Jepang dan Indonesia.¹⁶ Dimana melalui penandatanganan *Exchanges of Notes on the Integrated Marine and Fisheries Centers and Fish Market* tersebut menjadi awal mula hubungan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia pada sektor maritim, khususnya sektor perikanan di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Jepang juga berjanji akan membantu pembangunan pelabuhan di pulau-pulau terluar Indonesia yang tersebar di sekitar Laut Cina Selatan (LCS) dan Selat Malaka, termasuk mendirikan pasar nelayan di pulau-pulau terluar tersebut. Dalam kesempatan itu juga, kedua Menteri Luar Negeri dari kedua negara tersebut juga sepakat untuk mensinergikan konsep Indo-Pasifik yang diinisiasi Indonesia dengan konsep *Free and Open Indo-Pasific Strategy* dari Jepang.

Lewat *Free and Open Indo-Pasific Strategy* ini, Jepang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan memperkuat tatanan maritim yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum di seluruh wilayah Indo-Pasifik, untuk membuat wilayah 'barang publik internasional' yang secara merata membawa stabilitas dan kemakmuran bagi semua negara-negara di kawasan ini. Lebih

¹⁶ Indah Gilang Pusparani, 2018, *RI-Jepang Perkuat Kerjasama Maritim dan Infrastruktur*, Goodnews from Indonesia, diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/06/26/ri-jepang-perkuat-kerjasama-maritim-dan-infrastruktur> pada 25 November 2019

khusus lagi, Jepang bergerak maju pada aktualisasi strategi ini dengan memajukan upayanya pada tiga pilar, yaitu; (i) promosi dan pembentukan aturan hukum, kebebasan navigasi, dan perdagangan bebas; (ii) mengejar kemakmuran ekonomi melalui peningkatan konektivitas, termasuk melalui pengembangan 'infrastruktur berkualitas' sesuai dengan standar internasional; dan (iii) inisiatif untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang mencakup bantuan untuk pengembangan kapasitas penegakan hukum maritim, anti-pembajakan, dan pengurangan resiko bencana.¹⁷

Salah satu bentuk kerjasama Jepang-Indonesia pada sektor kemaritiman adalah melalui bantuan luar negeri yang diberikan Jepang melalui JICA pada proyek pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) di 6 pulau-pulau terluar Indonesia, yaitu Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, dan Biak. Yang mana letak pulau-pulau tersebut dinilai strategis oleh Jepang karena berdekatan dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Sebagai salah satu negara maritim yang kaya akan potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total produksi ikan laut dunia¹⁸, Indonesia dinilai masih belum mampu mengolah kekayaan laut tersebut dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan rendah dari para nelayan yang menangkap ikan di laut jika dibandingkan dengan pendapatan pembudidaya ikan di perairan umum dan di tambak.

¹⁷ *Op. Cit.*, Ministry of Foreign Affairs Japan, hlm. 2

¹⁸ Doksileg Dewan Perwakilan Rakyat RI, diakses dari <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150921-113245-4176.pdf> pada 10 Juli 2019, hlm. 1

Sehingga melalui dana hibah yang diberikan oleh Jepang pada Indonesia dalam proyek pembangunan SKPT ini sangat memberikan dampak yang besar bagi hasil produksi ikan laut di Indonesia. Dimana yang diketahui bahwa dari ke-6 pulau yang menjadi sasaran penyaluran hibah Jepang dalam pengembangan proyek SKPT tersebut merupakan wilayah perairan laut Indonesia yang memiliki kekayaan potensi produksi lestari ikan laut yang melimpah.

Jepang memberikan dana hibah sebesar 2,5 milyar Yen atau sekitar Rp 324 juta Rupiah untuk program pengembangan sektor perikanan untuk pulau-pulau terluar Indonesia.¹⁹ Yang mana bantuan tersebut disalurkan pada pengembangan SKPT di setiap pulau terluar Indonesia. Bantuan ini disepakati lewat penandatanganan naskah perjanjian antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Prabowo dan delegasi JICA untuk Indonesia, Shinichi Yamanaka di Gedung Mina Bahari I, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018.²⁰

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti juga mengatakan bahwa dana hibah yang diberikan oleh Jepang pada proyek ini merupakan bantuan

¹⁹ Lily Aprilia Pregiwati, 2018, *Terima Hibah Jepang, KKP Optimalkan Pembangunan 6 SKPT di Pulau Terluar*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/5391-terima-hibah-jepang-kkp-optimalkan-pembangunan-6-skpt-di-pulau-terluar> pada 10 Juli 2019

²⁰ *Ibid*,

dan hibah terbesar sepanjang sejarah Jepang.²¹ Dimana bantuan ini merupakan bantuan dana hibah terbesar khususnya pada bidang Kemaritiman Perikanan. Beliau juga mengatakan bahwa baru pertama kali Jepang sangat antusias dalam memberikan dana hibah, yaitu melalui proyek pembangunan SKPT ini.

Dengan kondisi dan latar belakang seperti yang telah dijabarkan diatas, dari segi penelitian perlu adanya kajian mengenai motif yang dimiliki oleh pemerintah Jepang dalam alokasi bantuan luar negeri ke Indonesia. Meskipun aliran bantuan melalui proyek-proyek bantuan tersebut dialokasikan berada pada sektor pembangunan kemanusiaan, tidak menutup kemungkinan adanya motif dibalik alokasi bantuan luar negeri Jepang dalam upaya penguasaan dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam proyek SKPT ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini adalah mengetahui motif yang dimiliki oleh pemerintah Jepang melalui pelaksanaan proyek pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) di Indonesia melalui JICA dengan jangka waktu satu tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Dengan melalui kerangka pemikiran yang ada, penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengetahui motif-motif yang dimiliki pemerintah Jepang dalam mengalokasikan bantuan luar negeri untuk sektor pembangunan kemanusiaan di Indonesia.

²¹ Eduardo Simorangkir, 2017, *RI Akan Dapat Dana Hibah Terbesar Jepang, Berapa Nilainya?*, Detik Finance, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3706578/ri-akan-dapat-dana-hibah-terbesar-jepang-berapa-nilainya> pada 9 Juli 2019

1.2 Rumusan Masalah

Melalui uraian pada latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

Apa motif bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam proyek pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Mampu menggambarkan motif bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam proyek pembangunan SKPT yang dilaksanakan di 6 pulau terluar Indonesia dalam periode 2017-2018,

1.3.2 Mampu memberikan informasi mengenai bantuan pemerintah Jepang dalam proyek bantuan pengembangan SKPT yang dilaksanakan di 6 pulau terluar Indonesia dalam periode tahun 2017-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, dalam segi akademis maupun praktis dan bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, yaitu penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan serta mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis.

1.4.1 Segi Akademis

- a. Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan pengembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya, dan ilmu pengetahuan pada umumnya,
- b. Memberi sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian pada materi yang sama, dan
- c. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.

1.4.2 Segi Praktis

- a. Dapat menambah wawasan dalam studi ekonomi politik melalui kerangka kerjasama bilateral pemberian bantuan luar negeri, dan
- b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pemerintahan suatu negara terkait dengan isu bantuan luar negeri.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penggunaan studi terdahulu menjadi dibutuhkan untuk memberikan gambaran bagaimana penelitian yang akan dilakukan dan isu yang akan dibahas. Penggunaan studi terdahulu juga dapat digunakan sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian. Studi terdahulu yang dapat digunakan berupa studi yang memiliki kesamaan kasus atau isu, teori atau konsep, variabel atau yang lainnya. Studi terdahulu yang penulis gunakan dalam hal ini untuk mengetahui apa motif negara *donor* memberikan bantuan luar negeri kepada negara *recipient*.

Studi terdahulu yang pertama adalah tulisan dari Jinhwan Oh dan Jisun Song dengan judul “*Dual determinants: Aid Disbursement and Volume, with Special Reference to Japan*”. Tulisan ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh Colege of Management-National Cheng Kung University di Taiwan. Persamaan tulisan Jinhwan Oh dan Jisun Song dengan tulisan penulis ialah sama-sama melihat Jepang sebagai negara donor dan bagaimana Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri baik dalam bentuk pinjaman maupun hibah, mulai dari bagaimana pengeluaran bantuan luar negeri sampai jumlah bantuan luar negeri nya. Perbedaan tulisan Jinhwan Oh dan Jisun Song dengan tulisan penulis ialah penulis menggunakan negara Indonesia sebagai

negara resipien, sedangkan tulisan Jinhwan Oh dan Jisun Song hanya berfokus dalam menjawab pertanyaan “Apa yang menentukan pengeluaran bantuan Jepang dan berapa atau bagaimana volume bantuannya sebelum dikeluarkan?”.²² Dengan kata lain, tulisan Jinhwan Oh dan Jisun Song tidak memberikan secara jelas negara apa yang menjadi resipien dalam tulisannya.

Kontribusi tulisan Jinhwan Oh dan Jisun Song ialah penulis bisa mengetahui apa yang menentukan pengeluaran bantuan Jepang dan berapa atau bagaimana volume bantuannya sebelum disalurkan. Selain itu, tulisan Jinhwan Oh dan Jisun Song menggunakan model *Inverted-U Shaped Relationship* oleh Robert M. Yerkes dan John Dillingham Dodson yang mana model ini secara garis besar berfokus untuk menyeimbangkan antara tekanan dan motivasi (*Balancing Pressure and Motivation*) dari Jepang sebagai negara donor ke negara resipien.²³ Meskipun penulis menggunakan konsep yang berbeda, tapi model *Inverted-U Shaped Relationship* berkontribusi terhadap penulis mulai dari apa saja tekanan yang diberikan Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri sampai hasil yang didapatkan Jepang sebagai negara donor.

Studi terdahulu yang kedua menggunakan jurnal yang ditulis oleh Syed Al Atahar yang berjudul “*An Assessment of Japan’s ODA to Bangladesh: Changing to a New Height of Relations*”. Secara garis besar, jurnal ini memberikan analisis bantuan luar negeri Jepang kepada Bangladesh. Selain

²² Jinhwan Oh dan Jisun Song, 2018, *Dual Determinants: Aid Disbursement and Volume, with Special Reference to Japan*, diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1029313217301781> pada 5 Juli 2019, hlm. 1

²³ *Ibid*, hlm 6

itu, Syed juga memberikan fokus kepada transformasi pemberian bantuan luar negeri selama tiga dekade sebelumnya terhadap perubahan respon dan perubahan kebutuhan serta prioritas kedua negara. Selain itu, jurnal ini juga memberikan fokus pada keunikan pemberian bantuan luar negeri Jepang ke Bangladesh dan menguji jarak antara kebijakan dan praktik yang ada kalanya menghalangi penggunaan ODA.²⁴

Pada pembahasan awal Syed dalam jurnalnya menjelaskan bahwa jalinan hubungan kerjasama antara Jepang dengan negara di kawasan Asia merupakan langkah awal dari berkontribusi Jepang dalam membangun keamanan dan pembangunan komunitas internasional melalui keamanan dan kemakmuran Jepang sendiri. Pemberian bantuan luar negeri Jepang ke kawasan Asia Selatan mulai terlihat pada tahun 1990-an. Pada mulanya, Jepang mempunyai pandangan bahwa negara di kawasan Asia Selatan merupakan negara miskin, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan infrastruktur rendah yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan asumsi dari pemerintah Jepang tersebut, bantuan luar negeri mulai banyak diberikan kepada negara-negara di kawasan Asia. Bantuan hibah mulai meningkat dan terlihat dalam program kecil di Asia seperti pembangunan rumah sakit, kenaikan angka NGO, dan perbaikan pemerintahan lokal.

Dalam sub bab selanjutnya, Syed menjelaskan bahwa kerjasama antara Jepang dengan Bangladesh secara historis mempunyai hubungan kuat dalam

²⁴ Syed Al Atahar, 2014 *An Assessment of Japan's ODA to Bangladesh: Changing to a New Height of Relations*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/276268923_An_Assessment_of_Japan's_ODA_to_Bangladesh_Changing_to_a_New_Height_of_Relations pada 5 Juli 2019, hlm. 239

hal kebudayaan, emosional, dan hubungan kemanusiaan. Pasca mendapatkan kemerdekaan, Jepang memberikan dana hibah kepada Bangladesh sebesar 3 juta Dollar AS untuk kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan dengan alasan politik dan kemanusiaan. Syed menjelaskan dalam jurnalnya, yaitu pada tahun 1985-2005 total bantuan luar negeri Jepang untuk Bangladesh hampir 200 juta Dollar AS. Hal tersebut menjadikan Jepang sebagai *top donor* di negara tersebut. Pada tahun 2000-2001, Bangladesh menjadi sepuluh besar negara penerima bantuan luar negeri dari Jepang.

Sebagai salah satu fokus dalam jurnal yang ditulisnya, Syed telah membagi pemberian bantuan luar negeri Jepang kepada Bangladesh dalam lima fase. Fase yang pertama yaitu pada tahun 1972-1985. Dalam fase ini, bantuan luar negeri Jepang kepada Bangladesh mempunyai fokus pada rehabilitas, ketahanan pangan, dan pembangunan negara. Fase kedua terjadi pada tahun 1986-1990. Pada fase ini bantuan luar negeri Jepang ke Bangladesh mempunyai fokus terhadap kebutuhan dasar manusia seperti pembangunan pedesaan, gender, dan kesehatan. Fase keempat terjadi pada tahun 1998-2005. Pada fase ini, bantuan Jepang ke Bangladesh mempunyai fokus pada *poverty reduction*. Fase kelima Syed menjelaskan dalam jurnalnya, yaitu *new phase of ODA*. Hal ini dikarenakan untuk pertama kali, Jepang dalam pengalokasian bantuan luar negeri berdasarkan pada *economic interest*. Pada fase sebelumnya, Syed menjelaskan bahwa sejak 1950-1990-an Jepang mempunyai *trend* sesuai dengan agenda nasional atau internasional

seperti *Fukuda Doctrine*, *oil shock*, *gift giving diplomatic (Omiagegaiko)*, *the idea of 'comprehensive security'*, dan *the Cold War*²⁵.

Studi terdahulu ini memberikan kontribusi kepada tulisan penulis.

Penelitian ini mempunyai kesamaan Jepang sebagai negara pemberi bantuan luar negeri. Perbedaannya, yaitu penulis melakukan penelitian dengan negara

Jepang sebagai negara yang memberikan bantuan luar negeri kepada

Indonesia, sedangkan jurnal yang ditulis oleh Syed Al Atahar melakukan penelitian dengan Jepang sebagai negara pemberi bantuan luar negeri kepada

Bangladesh. Penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai studi terdahulu

dengan tujuan sebagai perbandingan antara bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang Indonesia dan Bangladesh.

Studi terdahulu yang ketiga adalah tesis karya Maria Andersson yang berjudul "*Motives behind the Allocation of Aid: A Case Study Regarding*

Swedish Motives for Aid Allocation", yang diterbitkan oleh *Goterborghs*

Universitet. Tesis tersebut menjelaskan motif dibalik alokasi bantuan luar

negeri Swedia dilihat dari beberapa dokumen kebijakan luar negeri milik

Swedia ke beberapa negara, seperti *Statement of Government Policies 2005-*

2009, Global Challenges-Our Responsibility, empat dokumen *Strategy for*

Development Cooperation, dan dua dokumen *Phase-out Strategy*.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm. 254

²⁶ Maria Andersson, 2009, *Motives Behind Aid Allocation of Aid: A Case Study Regarding Swedish Motives for Aid Allocation*, Goteborgs Unversitat: Sratsvetenskapliga Institutionen, diakses dari https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24961/1/gupea_2077_24961_1.pdf pada 5 Juli 2019, hlm. 5

Andersson menggunakan penelitian sebelumnya tentang motif alokasi bantuan luar negeri milik Schraeder, Hook and Taylor (1998), David Sogge (2002), Berthelemy (2005 dan 2006) untuk memperdalam pemahaman mengenai motif alokasi bantuan luar negeri Swedia. Andersson menghasilkan enam motif dari penelitian sebelumnya, yaitu *humanitarian motives*, *economical motives*, *strategic motives*, *ideology motives*, *identity motives*, dan *environment motives*. Andersson menyebutkan bahwa dalam menganalisis motif dilihat dari tujuan aktor dan cara aktor mencapai tujuannya tersebut.²⁷

Dalam tesisnya, Andersson menganalisis enam variabel tersebut dan menemukan seluruh variabel tersebut dalam *policy papers* pemerintah Swedia. Jika di penelitian sebelumnya Swedia dikatakan memiliki motif dominan, yaitu *humanitarian motives*. Andersson menunjukkan hasil yang sedikit berbeda, dimana pemerintah Swedia memiliki motif lain meskipun *humanitarian motives* masih menjadi landasan dalam alokasi bantuan luar negeri. Jika sebelumnya pemerintah Swedia disebut '*more like merchant than activist*', Andersson menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar jika dilihat dari *policy paper* pemerintah Swedia saat ini.

Bagi pemerintah Swedia memang penting untuk mengembangkan bisnis Swedia lebih luas lagi, namun motif lain yang muncul didalam *policy paper* pemerintah Swedia sama banyaknya dengan motif ekonomi. Motif ekonomi

²⁷ *Ibid*,

dapat dilihat sebagai motif alturistik juga motif egois atau mementingkan diri sendiri.²⁸

Motif identitas, ekonomi, dan strategi juga ditemukan didalam alokasi bantuan luar negeri Swedia dan masih sama seperti penelitian dahulu yang disebut merkantilisme didalam bantuan luar negeri Swedia. Selain ketiga motif diatas, motif ideologi juga ada didalam *policy paper* pemerintah Swedia. Motif ideologi merupakan motif dari penelitian sebelumnya milik Schraeder, Hook dan Taylor. Swedia sangat kritis melawan rezim yang otoriter, namun di beberapa kerjasama Swedia mememilih untuk melanjutkan kerjasamanya seperti dengan Belarus dan Zimbabwe meskipun tidak di semua sektor. Di lain kerjasama, Swedia lebih memilih untuk menghentikan kerjasamanya dengan Vietnam dan Malawi terkait rezim otoriter. Hal yang menarik adalah motif ideologi digunakan sebagai alasan untuk melanjutkan dan menghentikan bantuan luar negeri.²⁹

Andersson memunculkan *environment* sebagai motif karena melihat ancaman lingkungan saat ini menjadi hal yang penting. Swedia merupakan salah satu negara yang aktif dalam mengurangi emisi gas. Andersson menemukan adanya peningkatan kerjasama pembangunan yang ramah lingkungan serta adanya bantuan langsung ke negara-negara dalam mengurangi emisi gas dan pengembangan sumber energi baru.³⁰

²⁸ *Ibid*,

²⁹ *Ibid*,

³⁰ *Ibid*,

Persamaan antara tesis milik Maria Andersson dengan penelitian milik penulis adalah Maria Andersson menggunakan motif alokasi bantuan luar negeri dengan menggabungkan beberapa motif milik peneliti lainnya, seperti David Sogge, Berthelemy, Schraeder, Hook and Taylor. Penulis sendiri menggunakan motif alokasi bantuan luar negeri milik David Sogge. Tesis milik Andersson memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis, yaitu penulis lebih memahami langkah dalam operasionalisasi variabel serta indikator dari konsep yang digunakan dalam penelitian penulis seperti yang dilakukan oleh Andersson melalui motif alokasi bantuan luar negeri David Sogge. Perbedaan penelitian terletak dari analisis kasus yang penulis ambil dan dari cakupan wilayah negara yang dibahas.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu fenomena dalam kajian hubungan internasional, yakni sebagai instrumen ekonomi politik suatu negara. Terdapat banyak definisi dari bantuan luar negeri, salah satunya definisi menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu aliran dana untuk suatu negara dengan tujuan utama digunakan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negara berkembang, bersifat konsensional serta terdapat unsur hibah dengan nilai paling sedikit 25 persen.³¹

³¹ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Official Development Assistance (ODA)*, diakses dari <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6043> pada 5 Juli 2019

Bantuan luar negeri sangat dekat kaitannya dengan kepentingan politik internasional dari negara donor seperti untuk pertahanan dan memberikan pengaruh politiknya, serta perilaku politik domestik negara penerima seperti demokrasi, kediktatoran, korupsi.³² Penjelasan yang berbeda mengenai bantuan luar negeri yang diberikan negara donor harusnya bersifat alturistik atau sukarela.³³ Bantuan luar negeri dimaksudkan untuk membantu negara berkembang di tahap 'take-off' melalui investasi.³⁴

Pada umumnya, bantuan luar negeri diberikan kepada negara penerima untuk memenuhi beberapa tujuan utama. Pertama, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan pembangunan infrastruktur, bantuan di bidang produksi seperti pertanian, juga perlunya penyaluran pembaruan teknologi. Kedua, menguatkan bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sistem politik. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan komoditas lainnya yang berkaitan dengan krisis kemanusiaan ataupun pemberian bantuan. Keempat, untuk menstabilkan ekonomi akibat krisis ekonomi.³⁵

Carol Lancaster menjelaskan bahwa bantuan luar negeri merupakan salah satu alat atau instrumen bagi negara donor dalam

³² Wolfgang Mayer dan Pascalis Raimondos Moller, *The Politics of Foreign Aid*, University of Copenhagen: Department of Economics, diakses dari <https://ideas.repec.org/p/kud/epuwp/99-07.html> pada 5 Juli 2019, hlm. 1

³³ *Ibid*,

³⁴ Christian Bjornskov, 2013, *Types of Foreign Aid*, Aarhus University: Department of Economics and Business, diakses dari https://pure.au.dk/portal/files/53611844/wp13_08.pdf pada 5 Juli 2019

³⁵ *Ibid*,

suatu kebijakan. Bantuan luar negeri juga dapat disertai dengan adanya perdagangan dan pengiriman militer ataupun segala macam pengiriman barang lintas negara. Dalam bukunya, Lancaster mempersempit definisi bantuan luar negeri sebagai pengiriman sumber daya secara sukarela, yang berasal dari pemerintah terhadap pemerintah negara lain, organisasi dan institusi internasional, dengan setidaknya 25 persen merupakan hibah dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di negara penerima bantuan tersebut.

“Foreign aid as a voluntary transfer of public resources, from a government to another independent government, to an NGO, or to an international organization (such as the World Bank or the UN Development Program) with at least a 25 percent grant element, one goal of which is to better the human condition in the country receiving the aid.”³⁶

Kemudian Lancaster juga menambahkan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor dapat diberikan dalam bentuk hibah maupun pinjaman lunak, dalam suatu jenis atau macam tertentu, seperti bantuan pangan, maupun dalam bentuk penghapusan hutang. Yang mana dari beberapa bentuk diatas dapat digunakan oleh negara penerima bantuan dalam mendanai suatu aktivitas, menyeimbangkan neraca pembayaran, riset dan investasi, reformasi ekonomi maupun

³⁶ Carol Lancaster, 2007, *Foreign Aid: Diplomacy, Development and Domestic Politic*, Chicago: The University of Chicago Press, diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=KwFp1jQ-1dUC&printsec=frontcover&dq=Foreign+Aid+Diplomacy,+Development,+Domestic+Politics+ca+rol+lancaster&hl=id&sa=X&ved=0ahlUKEwiR4rKvsKnjAhUK6Y8KHENCf4Q6AEKIKzAA#v=onepage&q=Foreign%20Aid%20Diplomacy%2C%20Development%2C%20Domestic%20Politi cs%20carol%20lancaster&f=false> pada 5 Juli 2019, hlm. 4

politik di negara yang bersangkutan, bantuan teknis dan pelatihan dalam rangka kemanusiaan.

“Aid can be in the form of cash (grants or concessional loans), in kind (e.g., food aid), or in the form of debt relief. These transfer can fund a diverse set of activities: budgetary and balance of payment needs in recipient countries, investment projects and research activities, economic or political reform programs, technical advice and training, and humanitarian relief.”³⁷

Berdasarkan kategori pemberian bantuan luar negeri, terdapat dua macam bantuan luar negeri. Yang pertama adalah bantuan luar negeri bilateral, di mana bantuan tersebut diberikan secara langsung dari negara donor langsung ke negara penerima bantuan. Bentuk bantuan luar negeri yang kedua adalah bantuan luar negeri multilateral di mana bantuan tersebut diberikan oleh atau didistribusikan terhadap negara penerima melalui organisasi internasional. Kategorisasi berikutnya terdiri dari bantuan humanitarian (*humanitarian aid*), dan bantuan pembangunan (*development aid*). *Humanitarian aid* merupakan suatu bantuan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dalam suatu negara yang membutuhkan bantuan segera.

Sedangkan *development aid* merupakan bantuan yang ditujukan untuk program-program jangka panjang.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 11

³⁸ Andrew Heywood, 2011, *Global Politics*, London: Palgrave Macmillan, diakses dari <https://peda.net/jao/lyseo/isac/ias/global-politics/ahgp/the-whole-book:file/download/e7ab471d24086998cb255025c53dc75c3c92ed9c/Andrew-Heywood-Global-Politics%20%28kopio%29.pdf> pada 5 Juli 2019, hlm. 376

Dalam kerjasama bilateral, negara pendonor secara langsung menyalurkan bantuan luar negeri kepada pemerintah negara penerima tanpa lembaga perantara. Sedangkan untuk kerjasama multilateral, bantuan luar negeri disalurkan melalui badan atau organisasi perantara yang secara khusus menangani permasalahan bantuan pembangunan ekonomi, seperti UN.³⁹

2.2.2 Motif Bantuan Luar Negeri

Dalam pemberian bantuan luar negeri, bantuan yang digunakan dan diberikan oleh negara donor kepada negara penerima memiliki kepentingan nasional yang hendak dicapai seperti memperdalam hubungan komersial dengan negara penerima, sehingga tidak hanya untuk aliansi politik. Tidak semua negara donor memiliki kepentingan geopolitik yang kuat, tetapi semuanya memiliki kepentingan perdagangan. Motif bantuan luar negeri yang didasarkan pada kepentingannya sendiri biasanya akan bias terhadap negara-negara yang cenderung memiliki hubungan dagang yang dekat dengan negara donor.⁴⁰

Dudley dan Montmarquette mengidentifikasi tiga motif donor.

Pertama, para donor mengharapkan negara-negara penerima untuk memberikan dukungan bagi kepentingan para donor yang mungkin

³⁹ Farah Abuzeid, 2006, *Foreign Aid and the "Big Push" Theory: Lessons from Sub-Saharan Africa*, diakses dari https://www-lb.stanford.edu/group/sjir/pdf/Aid_11.1.pdf pada 5 Juli 2019, hlm. 17

⁴⁰ Jean-Claude Berthelemy, 2005, *Bilateral Donor's Interest vs Recipients Development Motives In Aid Allocation: Do All Donors Behave The Same?*, diakses dari <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00193273/document> pada 5 Juli 2019, hlm. 10

dalam lingkup politik internasional. Kedua, negara penerima dapat melakukan perdagangan dengan negara donor, untuk memajukan kepentingan ekonomi para negara donor. Ketiga, negara donor mungkin percaya bahwa bantuan mereka untuk membantu warga negara penerima guna memiliki standar hidup yang lebih baik.⁴¹

Penjelasan di atas dijadikan penulis sebagai dasar dalam menemukan fenomena dari motif antusiasme dan ketertarikan Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri ke Indonesia melalui JICA dalam proyek pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual milik David Sogge dalam bukunya yang berjudul *Give and Take: What's Matter with Foreign Aid*, untuk menjawab rumusan masalah “Apa motif bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam proyek pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia?”. Konsep motif bantuan luar negeri milik David Sogge digunakan oleh penulis sebagai kerangka konseptual karena konsep ini sudah mencakup konsep-konsep sebelumnya milik K.J Holsti, Lancaster, dan Berthelemy sehingga lebih komprehensif.⁴²

⁴¹ Subhayu Bandyopadhyay dan E. Katarina Vermann, 2013, *Donor Motives for Foreign Aid*, diakses dari <https://research.stlouisfed.org/publications/review/2013/09/06/donor-motives-for-foreign-aid> pada 6 Juli 2019, hlm. 329

⁴² David Sogge, 2002, *Give and Take: What's the Matter with Foreign Aid*, London: Zed Books Ltd., hlm. 41-42

David Sogge menyebutkan adanya tiga motif dalam mengalokasikan bantuan luar negeri negara donor kepada negara penerima, yaitu *socio-political motives*, *mercantile motives*, dan *humanitarian and ethical motives*.⁴³

Socio-political motives atau motif sosial politik merupakan motif pertama dalam motif pemberian bantuan luar negeri yang berisi kepentingan politik donor dalam mempengaruhi pemberian bantuan luar negerinya. Jangka pendek dari motif ini yaitu negara donor mendukung negara penerima dari sisi politik dalam hal negosiasi, perang, dan krisis.⁴⁴ Negara donor memberikan dukungan di tingkat domestik negara penerima seperti mencegah juga meredakan protes dan pemberontakan yang dapat muncul dari masyarakat, dan menyediakan basis data intelejen. Salah satu hasil dari tindakan negara donor tersebut adalah mendapatkan keberpihakan negara penerima kepada negara donor dalam forum internasional. Pada intinya, negara donor ingin menghargai dan mempertahankan loyalitas dari sisi politik, serta agar dilihat sebagai tindakan ‘melakukan sesuatu’ di negara penerima.⁴⁵

Dalam implikasi jangka pendek, motif ini akan menjaga negara penerima bantuan untuk tetap berada pada mendukung negara donor secara politik seperti dalam negosiasi atau krisis yang lain, menghentikan protes atau pemberontakan serta mempengaruhi

⁴³ *Ibid*, hlm. 45

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 41

⁴⁵ *Ibid*,

pembuatan kebijakan. Sedangkan untuk kondisi domestik, motif sosio-politik strategis merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk mendapatkan dorongan positif dari kekuatan politik maupun etnis dalam negeri.⁴⁶

Dalam implikasi jangka panjang, bantuan juga ditujukan negara donor untuk mendapatkan akses dan loyalitas dari pemimpin negara resipien sehingga mendukung hubungan kerjasama negara donor dengan negara resipien mengenai agenda politik atau ekonomi. Lalu untuk menyebarkan atau memperkuat penanaman doktrin atau model pembangunan, meningkatkan kedudukan negara penerima bantuan dalam sistem ekonomi, maupun politik, menstabilkan kondisi ekonomi negara sehingga mencegah munculnya suatu masalah, seperti migrasi dan terorisme, dan di level internasional untuk mempromosikan negara donor memiliki kemampuan dalam menciptakan dan mengontrol agenda ekonomi dan politik dalam institusi internasional. Sedangkan motif terhadap kondisi domestik adalah untuk mengkonsolidasikan dukungan publik yang berkaitan dengan bantuan luar negeri yang diberikan.⁴⁷ Yang mana dari penjelasan di atas menurut David Sogge dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan luar negeri, terdapat kepentingan-kepentingan politik dari negara donor. Indikator dari kepentingan politik yang terdapat pada penjelasan tersebut berupa *influence on decision making*, yang dapat dipahami dengan menjelaskan

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 41-42

negara donor melalui pemberian bantuan luar negeri dapat mempengaruhi kebijakan atau pandangan politik negara penerima bantuan. Karena bantuan luar negeri seringkali diikuti oleh berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan diimplementasikan oleh negara resipien. Bantuan luar negeri dari negara donor dimaksudkan sebagai upaya dan hadiah (*reward*) agar negara penerima mau mengarahkan kebijakan politiknya untuk mendukung atau menguntungkan negara donor, sehingga kepentingan nasionalnya dapat dicapai melalui kebijakan luar negeri melalui instrumen bantuan luar negeri. Intervensi juga dapat digunakan supaya negara penerima bantuan selalu berada di sisi negara pendonor dalam forum internasional.⁴⁸

Kemudian indikator yang kedua yaitu *regular acces*, adanya keinginan untuk membangun atau meningkatkan akses terhadap pemerintah atau pemimpin negara penerima. Dengan harapan, pemerintah negara resipien akan menunjukkan sikap loyal kepada negara pendonor, yang mana berperan penting bagi negara donor untuk menjalankan program kepentingan dalam berbagai aspek hingga level internasional. Dan indikator yang ketiga adalah doktrin, yang menjelaskan bahwa pemberian bantuan merupakan upaya untuk menanamkan doktrin atau model pembangunan untuk diterapkan didalam negara penerima bantuan. Sehingga dapat menjadi landasan atau mempermudah pembentukan kerjasama antara negara donor

⁴⁸ *Ibid*,

dengan pemerintah negara penerima bantuan maupun membendung efek tertentu yang tidak diharapkan, misalnya terorisme dan migrasi.⁴⁹

Motif kedua adalah *mercantile motives* atau motif ekonomi, yang berkaitan dengan aspek perdagangan atau komersial, motif ini memiliki implikasi jangka pendek dalam rangka meningkatkan kesempatan merebut pasar di negara resipien. Dalam sektor domestik negara donor untuk meningkatkan daya tarik sektor bisnis serta menyediakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki keseimbangan neraca pembayaran.⁵⁰

Motif merkantilis jangka panjang adalah untuk menguasai, meningkatkan, sekaligus melindungi kesempatan perdagangan dan investasi, termasuk akses strategis terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja, serta menjaga dan menstabilkan peraturan perekonomian dalam institusi internasional. Dan di level domestik untuk mengkonsolidasikan dan melindungi sektor perekonomian dalam negeri negara donor.⁵¹

Kepentingan komersial dalam pemberian bantuan luar negeri merupakan motif yang paling penting menurut Berthelemy, hal itu dikarenakan meskipun negara donor dalam memberikan bantuan luar negeri tidak memiliki kepentingan atau motif politik yang kuat, negara-negara donor tersebut semuanya memiliki kepentingan komersial.

⁴⁹ *Ibid*,

⁵⁰ *Ibid*,

⁵¹ *Ibid*, hlm. 42

Sehingga bantuan luar negeri juga berfungsi untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara negara donor dan penerima bantuan, selain sebagai instrumen untuk mendapatkan kepentingan politik.⁵²

Kemudian motif ketiga adalah motif kemanusiaan (*humanitarian motives*), motif ini memiliki implikasi jangka pendek bahwa pemberian bantuan luar negeri menunjukkan rasa kepedulian negara donor dalam membantu negara lain yang sedang mengalami masalah atau isu tersebut. Sedangkan implikasi jangka panjangnya bahwa negara penerima bantuan mendapatkan kesan yang positif bahwa negara tersebut memiliki perhatian sekaligus turut berkontribusi dalam penyelesaian masalah atau isu tersebut dalam perdagangan internasional. Sekaligus menunjukkan rasa solidaritas terhadap kelompok-kelompok tertentu, terlebih lagi jika kelompok tersebut didalam negara donor itu sendiri.

Motif humanitarian dalam bantuan luar negeri merupakan suatu upaya dari pembuat kebijakan negara donor terhadap penurunan angka kemiskinan serta membantu masyarakat yang berada dalam kondisi kesulitan di negara penerima bantuan luar negeri. Motif ini adalah motif yang paling dapat diterima di mata internasional dan khususnya negara penerima, sekaligus menjadi motif yang paling ingin dicitrakan oleh negara donor bantuan luar negeri.

⁵² Jean-Claude Berthelemy, 2006, *Aid Allocation: Comparing donors' behaviours*, diakses dari <https://www.regeringen.se/49bb57/contentassets/947b93ddf56e4d8d889d4115b4139fdd/jean-claude-berthelemy-aid-allocation-comparing-donors-behaviours> pada 6 Juli 2019, hlm. 82

2.3 Definisi Operasional

2.3.1 Motif Bantuan Luar Negeri

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang yang telah penulis jabarkan di bab satu, penulis akan menggunakan konsep motif bantuan luar negeri milik David Sogge untuk menganalisa fenomena yang diteliti oleh penulis, yaitu motif pemberian bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam proyek pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia. Penulis menggunakan konsep ini dikarenakan didalamnya terdapat variabel dan indikator yang menjelaskan apa motif suatu negara memberikan bantuan luar negerinya kepada negara lain. Dari ketiga variabel tersebut, terdapat beberapa indikator pada masing-masing variabel yang berfungsi sebagai alat ukur dalam penelitian yang dilakukan.

1. *Socio-political Motives*

Dalam motif sosio-politik, indikator pertama adalah *influence on decision making*. Berdasarkan pada pelaksanaan proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang berkaitan untuk mencapai tujuan yang ingin didapatkan dalam proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia tersebut. Dalam memberikan bantuan luar negeri, negara donor akan memberikan persyaratan bagi negara penerima bantuan atau pemerintah penerima bantuan akan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan bantuan luar negeri yang diberikan tersebut, misalnya mempromosikan

pengelolaan dan praktik penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, maupun pembentukan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan lainnya di negara penerima bantuan yang mendukung terhadap terlaksananya proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia, yaitu Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, dan Biak.⁵³ Jadi, melalui upaya mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut, penulis ingin mencari tahu lebih lanjut apakah pemerintah Jepang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui instrumen pemberian bantuan luar negeri tersebut sehingga mampu mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi pembuatan kebijakan dalam negeri yang mungkin dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah Jepang.

Indikator kedua adalah *regular access*. Melalui berbagai macam bantuan yang telah diberikan Jepang ke Indonesia pada bidang pembangunan ‘kemanusiaan’ melalui proyek pembangunan SKPT untuk sektor perikanan dan kelautan tersebut antara pemerintah Jepang dan Indonesia, penulis ingin melihat apakah dari pemberian bantuan luar negeri tersebut akan tercipta loyalitas pemerintah penerima bantuan luar negeri (Indonesia) kepada negara donornya (Jepang), baik secara khusus berkaitan dengan program-program dan kebijakan mengenai isu pembangunan ‘kemanusiaan’ khususnya pada sektor perikanan dan kelautan maupun sektor lainnya yang akan terbentuk selanjutnya antara

⁵³ Admin Biak, 2018, *Pelatihan kapasitas pegawai kelautan dan perikanan untuk mengembangkan pulau-pulau terluar Indonesia*, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, diakses dari <https://kkp.go.id/SKPT/Biak/artikel/6833-pelatihan-kapasitas-pegawai-kelautan-dan-perikanan-untuk-mengembangkan-pulau-pulau-terluar-indonesia> pada 7 Juli 2019

pemerintah Jepang dan Indonesia, hingga pada level atau forum internasional. Jika bantuan luar negeri yang diberikan tersebut dapat menciptakan loyalitas negara penerima bantuan luar negeri kepada negara donornya, penulis ingin mengetahui apakah sikap loyalitas tersebut dapat membuat negara penerima bantuan luar negeri akan mendukung upaya negara donor dalam menjalankan program-program lainnya.

Khusus pada sektor pembangunan di bidang perikanan dan kelautan dalam proyek pembangunan SKPT, pemerintah Indonesia menerima berbagai syarat dalam bantuan pembangunan yang diberikan oleh Jepang. Sehingga penulis ingin mengetahui apakah nantinya bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang tersebut akan dapat mempermudah terbentuknya kerjasama lanjutan antara pemerintah Jepang bersama pemerintah Indonesia yang memiliki kaitan dengan agenda bantuan pembangunan 'kemanusiaan' yang dimiliki oleh Jepang.

Indikator ketiga dalam penjelasan motif sosio-politik adalah doktrin. Melalui pemberian bantuan luar negeri tersebut penulis ingin melihat apakah pemerintah Jepang berupaya untuk menanamkan prinsip pembangunannya dalam menangani masalah atau pemanfaatan sumber daya alam di negara berkembang (Indonesia). Bagi pemerintah Indonesia, pelaksanaan proyek pembangunan SKPT di sektor perikanan dan kelautan ini akan membantu pemerintah dalam upaya untuk membangun dan meningkatkan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di 6 pulau terluar

Indonesia secara berkelanjutan.⁵⁴ Dan bagi pemerintah Jepang, pelaksanaan proyek SKPT ini merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan Jepang pada sektor maritim Indonesia dalam rangka untuk mencapai perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di dunia,⁵⁵ sehingga melalui pelaksanaan SKPT tersebut, penulis ingin melihat apakah pemerintah Jepang menerapkan suatu prinsip dalam pemberian bantuan luar negeri mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. *Mercantile Motives*

Dalam motif merkantilis atau ekonomi, indikator pertama adalah melindungi kesempatan perdagangan dan investasi. Sehingga penulis ingin melihat bagaimana bantuan JICA dalam mempertahankan perdagangan komoditi atau hasil sumber daya maritim di Indonesia supaya stabil dan berkelanjutan serta dapat terbentuknya kemampuan pemerintah Indonesia dalam manajemen sumber daya maritim yang baik.

Indikator kedua adalah investasi, dimana pada indikator kedua ini penulis ingin melihat apa sebenarnya motif ekonomi pemerintah Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri dan juga mempertimbangkan mengenai tingkat investasi yang ditanamkan dari negara donor (Jepang) di negara penerima bantuan (Indonesia).

⁵⁴ *Loc. Cit.*, Lily Aprilia Pregiawati

⁵⁵ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, *Hubungan Internasional*, diakses dari https://www.id.emb-japan.go.jp/explj_14.html pada 7 Juli 2019

3. *Humanitarian Motives*

Motif ketiga dalam penjelasan David Sogge adalah motif humanitarian atau kemanusiaan, indikator pertamanya adalah *reducing poverty*. Dalam *reducing poverty* membantu penulis untuk melihat apakah motif pemerintah Jepang melalui bantuan luar negeri yang disalurkan kepada Indonesia oleh JICA pada proyek pembangunan SKPT ini sebagai upaya pemerintah Jepang untuk mengentaskan kemiskinan, dimana penulis melihat bahwa bantuan yang disalurkan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan manajemen perikanan yang berkelanjutan sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Dan masyarakat yang berada di sekitar proyek SKPT ini tetap memiliki akses yang baik terhadap sumber daya alam yang ada didalamnya, sekaligus dapat memberdayakan masyarakat sekitar baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan area SKPT tersebut. Khususnya pada masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada wilayah pesisir dan laut Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, dan Biak.

Indikator kedua dalam motif ini adalah *showing compassion*, yang memiliki tujuan dan keuntungan yang akan dicapai dimana menunjukkan bahwa pemerintah Jepang memiliki kontribusi dalam isu pembangunan 'kemanusiaan' di level internasional. Dalam hal ini penulis ingin melihat apakah Jepang juga memiliki motif yang serupa dalam pemberian bantuan luar negerinya pada proyek pembangunan SKPT. Dikarenakan penulis melihat bahwa pemerintah Jepang membantu pemerintah Indonesia dalam

menanggulangi masalah di sektor perikanan dan kelautan sekaligus membantu masyarakat yang terdampak dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal maupun nasional.

Di bawah ini merupakan tabel operasionalisasi antara variabel, indikator penulis:

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Indikator	Operasionalisasi Konsep
Motif Bantuan Luar Negeri oleh David Sogge	Socio-political Motives	<i>Influence on Decision Making</i>	Adanya penentuan kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dalam manajemen sumber daya kelautan yang sesuai dengan program bantuan JICA
		<i>Regular Access</i>	Terbentuknya program kerjasama lanjutan antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam kerjasama di bidang pembangunan ‘kemanusiaan’, khususnya pada sektor perikanan atau maritim
		<i>Doctrine</i>	Penanaman prinsip bantuan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek perikanan, kelautan dan masyarakat
	Mercantile Motives	<i>Protect Trade & Investment Opportunities</i>	Adanya kepentingan Jepang untuk mempertahankan peluang perdagangan dan investasi di sektor maritim Indonesia
		<i>Strategic Access</i>	Adanya upaya Jepang untuk mendapatkan akses strategis sumber daya maritim (perikanan dan kelautan) di Indonesia
	Humanitarian Motives	<i>Reducing Poverty</i>	Adanya upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan JICA di Indonesia



			Adanya kepentingan Jepang untuk memperoleh citra positif dalam upaya konservasi maritim Indonesia maupun kepedulian terhadap negara-negara berkembang
--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari tabel operasionalisasi konsep diatas dapat dilihat bahwa pada variabel yang pertama *Socio-political Motives* ini terdapat tiga indikator didalamnya yang masing-masing dari ketiga indikator tersebut, penulis melihat bahwa dimungkinkan ada beberapa motif pemberian bantuan luar negeri Jepang didalamnya. Pada indikator yang pertama, *influence on decision making*, penulis melihat bahwa dimungkinkan pada pemberian bantuan luar negeri Jepang ini didalam proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Jepang memiliki motif untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan didalam manajemen sumber daya kelautan Indonesia yang sesuai dengan program bantuan *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

Lalu pada indikator yang kedua, *regular access*, penulis melihat bahwa dimungkinkan motif Jepang dalam pemberian bantuan luar negeri tersebut agar terciptanya loyalitas dari pemerintah Indonesia melalui terbentuknya program kerjasama lanjutan antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam kerjasama di bidang pembangunan, khususnya pada sektor maritim dan perikanan. Selanjutnya pada indikator yang ketiga *doctrine*, penulis melihat bahwa dimungkinkan adanya

motif Jepang untuk menanamkan prinsip bantuan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek perikanan, kelautan dan masyarakat.

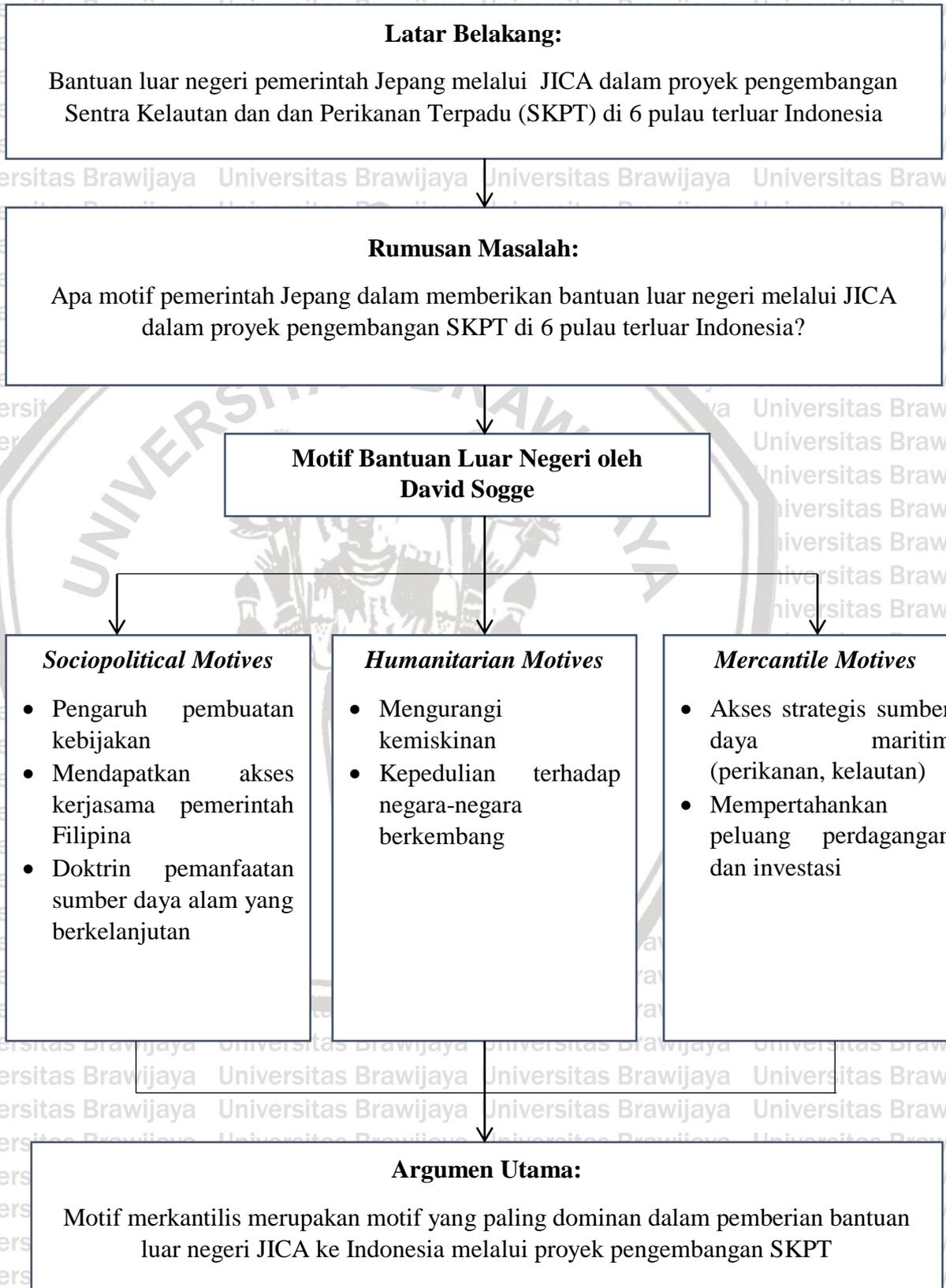
Lalu pada variabel yang kedua *Mercantile Motives* ini terdapat dua indikator didalamnya yang mana di masing-masing indikator tersebut penulis melihat kemungkinan adanya motif kepentingan Jepang dalam pemberian bantuan luar negerinya didalam proyek pembangunan SKPT. Pada indikator yang pertama, *protect trade & investment opportunities*, penulis melihat kemungkinan dalam pemberian bantuan luar negeri Jepang ini, Jepang memiliki kepentingan untuk mempertahankan peluang investasinya didalam sektor kemaritiman dan perikanan Indonesia. Lalu pada indikator yang kedua, *strategic access*, penulis melihat kemungkinan didalam pemberian bantuan luar negeri ini, Jepang berupaya untuk mendapatkan akses yang strategis terhadap sumber daya kelautan Indonesia.

Selanjutnya pada variabel yang ketiga *Humanitarian Motives*, terdapat dua indikator didalamnya yang masing-masing dari kedua indikator tersebut penulis melihat kemungkinan terdapat motif kepentingan Jepang dalam pemberian bantuan luar negerinya dalam proyek pembangunan SKPT ini. Pada indikator yang pertama, *reducing poverty*, penulis melihat kemungkinan adanya upaya Jepang dalam membantu Indonesia menangani pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya pada masyarakat pesisir melalui program bantuan JICA di Indonesia. Lalu pada indikator yang kedua, *showing compassion*, penulis melihat kemungkinan adanya kepentingan Jepang untuk memperoleh citra positif di dunia global atas kepeduliannya terhadap negara-negara berkembang yang mana hal ini

dapat terlihat dalam upaya konservasi maritim-perikanan Indonesia yang dilakukan oleh *Japan International Cooperation Agency (JICA)*.



2.4 Alur Pemikiran



2.5 Argumen Utama

Berdasarkan pada latar belakang dan penjelasan konsep motif bantuan luar negeri, penulis mencoba memberikan argumen utama dalam penulis skripsi ini sebagai berikut: Motif pemerintah Jepang memberikan bantuan luar negeri dalam proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia didasari oleh beberapa motif bantuan luar negeri yang dijelaskan oleh David Sogge yang pertama, *Socio-Political Motives* yaitu upaya pemerintah Jepang untuk mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan dan memperoleh sikap loyal dari pemerintah Indonesia. Kedua, *Mercantile Motives* yaitu upaya pemerintah Jepang untuk mempertahankan perdagangan dan investasi, serta dapat mendapatkan akses strategis terhadap sumber daya maritim dan perikanan di Indonesia. Ketiga, *Humanitarian Motives* yaitu upaya pemerintah Jepang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menunjukkan kepedulian pemerintah Jepang terhadap negara-negara berkembang (Indonesia).

Dan menurut penulis, motif Merkantilis atau *Mercantile Motives* merupakan motif yang paling dominan dalam pemberian bantuan luar negeri yang diberikan Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) di dalam proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dari penjelasan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, untuk membantu dalam penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana dan sebagainya atau hanya berupaya melaporkan apa yang terjadi.⁵⁶ Sehingga dapat menggambarkan dan menginterpretasi suatu objek dengan keadaan nyata. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi digunakan untuk melihat gejala yang ada. Dengan harapan jenis penelitian yang dipilih ini akan membantu memperlancar dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat dan menunjang penyempurnaan hasil penelitian.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi waktu penelitian antara tahun 2017-2018. Dalam penelitian ini yang menjadi dasar untuk melihat adalah pelaksanaan bantuan luar negeri oleh *Japan International Cooperation Assistance* (JICA) dalam proyek pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia dengan rentang waktu pemilihan data mulai tahun 2017-2018, berkaitan dengan mekanisme dan motif upaya JICA dalam pembangunan kemanusiaan. Dalam rentang waktu

⁵⁶ Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, hlm. 68

pelaksanaan kerjasama tersebut dapat dilihat adanya motif menggunakan indikator dalam konsep Bantuan Luar Negeri dari David Sogge yang dipakai dalam penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dari buku dan literatur atau sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁷ Dengan sumber data yang didapatkan berupa data sekunder. Ini merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dari pihak kedua atau sumber lain yang telah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian.⁵⁸ Data tersebut diperoleh melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang menjadi sumber acuan utama bagi penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan ini menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah atau topik yang sedang diteliti. Informasi yang dikumpulkan oleh penulis dapat berupa buku, jurnal, tesis, surat kabar dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan berbagai informasi yang sesuai dengan topik yang dibahas. Proses seleksi akan tetap dilakukan mengingat kemungkinan tidak semua informasi akan digunakan oleh penulis. Dan setelah proses seleksi data selesai, kemudian data akan disusun secara sistematis.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45

⁵⁸ Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 291

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan oleh penulis merupakan teknik analisis data kualitatif, yaitu sebagai pemahaman proses suatu pemahaman masalah sosial menggunakan penjabaran dalam bentuk kata-kata.⁵⁹ Teknik analisis data dilakukan oleh penulis melalui data-data yang bersifat sekunder meliputi buku, jurnal, situs internet, maupun media lain yang mendukung penulisan skripsi penulis. Selanjutnya akan digambarkan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat non-verbal. Dimulai dengan memahami data yang diambil, kemudian mempertimbangkan data yang memenuhi dan mendukung skripsi yang ditulis, memilah data yang akan diambil, kemudian menyatukan data-data tersebut untuk menciptakan analisis yang komprehensif dan saling mendukung satu sama lain.

3.5 Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan secara umum tentang alur penelitian melalui sistematika penulisan dalam penelitian ini yang terdiri dari enam bab, yaitu:

1. BAB I merupakan pendahuluan, dimana penulis akan menjelaskan latar belakang masalah yang muncul serta rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian,
2. BAB II terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran atau konsep mengenai bantuan luar negeri, dan hipotesis yang diajukan berdasarkan

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 77

kasus yang diambil dalam skripsi ini. Dalam peringkat analisis, penulis menggunakan pada level sistem internasional untuk mempermudah menjelaskan penelitian yang akan dilakukan dan menggunakan konsep bantuan luar negeri dalam menganalisis rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, serta menjabarkan argumen utama sesuai dengan konsep yang digunakan,

3. BAB III berisi mengenai metodologi yang digunakan oleh penulis, yang mana akan dijelaskan jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang diperoleh, dan sistematika penulisan yang digunakan sebagai panduan penyusunan skripsi ini,
4. BAB IV menjelaskan tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan Bantuan luar negeri *Japan International Cooperation Assistance* (JICA) dalam proyek pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia, yang berisi sejarah bantuan luar negeri Jepang, bantuan luar negeri Jepang di Indonesia, dan bantuan Jepang dalam proyek SKPT tahun 2018, yang disertai dengan penyajian dan analisis data yang telah diperoleh dan diolah sehingga mendukung untuk menjelaskan masalah yang diambil dari skripsi ini,
5. BAB V berisi tentang hasil dan pembahasan dari data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan analisis dari konsep yang terdapat pada BAB II dan menjelaskan Motif Bantuan Luar Negeri *Japan International Cooperation Assistance* (JICA) dalam proyek pembangunan SKPT, dan



6. BAB VI berisi penutup, bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian in yang mencakup kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum berdasarkan dengan penelitian yang diambil yaitu motif Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) pada tahun 2018. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran secara umum mengenai bantuan luar negeri Jepang tersebut, penulis akan mulai menjelaskan dari sejarah bantuan luar negeri Jepang itu sendiri beserta profil dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sebagai lembaga resmi pemerintah Jepang yang menangani bantuan luar negeri Jepang. Selain itu, dalam bab ini juga penulis juga akan menjelaskan sedikit mengenai bentuk bantuan luar negeri dari Jepang. Kemudian penulis akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai bantuan luar negeri Jepang dalam proyek pembanguna Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) pada tahun 2018.

4.1 Sejarah Bantuan Luar Negeri Jepang

Secara singkat, bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah Jepang bertujuan sebagai upaya pemerintah Jepang dalam memberikan kontribusi bagi perdamaian dan pembangunan komunitas internasional serta menjamin adanya kemakmuran dan keamanan untuk Jepang yang dicantumkan dalam *Japan's ODA Charter*.⁶⁰ Dari tujuan yang tercantum dalam *Japan ODA Charter* tersebut dapat dilihat bahwa prioritas pemberian ODA Jepang

⁶⁰ *Op. Cit.*, Ministry of Foreign Affairs Japan

memang ditujukan untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pemberian bantuan luar negerinya terdapat beberapa motif kepentingan Jepang terhadap negara penerima bantuan luar negerinya.

Pemerintah Jepang saat ini merupakan salah satu negara donor terbesar di kawasan negara Asia, yang mana hal ini dapat dilihat pada *White Paper on Development 2017* dalam MOFA Japan 2017. Selain itu, bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah Jepang dimulai pasca berakhirnya perang dunia kedua yang mana bantuan ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab untuk membayar ganti rugi perang terhadap negara-negara yang menjadi ‘korban’ perang selama perang dunia kedua yang dilakukan Jepang.⁶¹ Dimana perjanjian ganti rugi terhadap negara yang menjadi ‘korban’ penjajahan Jepang selama perang dunia kedua tercantum dalam perjanjian perdamaian San Fransisco tahun 1951 yang mengharuskan Jepang untuk membayar reparasi akibat perang di negara-negara yang menjadi jajahan Jepang pada perang dunia kedua.⁶²

Bantuan yang diberikan sebagai bentuk untuk membayar ‘ganti rugi’ pada dasarnya berupa bantuan dana hibah dan kerjasama teknis untuk pembangunan pasca perang dunia kedua. Sekalipun hal ini terlihat bahwa Jepang mengalami kerugian, dikarenakan harus membayar sejumlah biaya

⁶¹ M Abdurrohhim, 2017, *Sejarah Bantuan Luar Negeri Jepang Pasca Perang Dunia Ke-2*, diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12757/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAll> owed=y pada 20 November 2019

⁶² *Ibid*,

‘ganti rugi’ pasca perang, namun sesungguhnya hal inilah yang menjadi awal ekspansi ekonomi bagi Jepang itu sendiri.

Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang kepada negara resipien nya umumnya bersifat mengikat, dimana negara yang menerima bantuan luar negeri dari Jepang wajib menggunakan semua produk Jepang yang akan diperlukan dalam pelaksanaan perbaikan atau pembangunan negaranya.

Sebagai contohnya dalam membangun jembatan, pemerintah negara penerima bantuan luar negeri Jepang, wajib menggunakan bahan-bahan konstruksi Jepang, tenaga ahli dari Jepang, serta kontraktor dari Jepang yang akan menjalankan pekerjaan tersebut, walaupun ada kerjasama dengan pengusaha lokal, namun proporsinya tidak seimbang. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa adanya pengenalan sejumlah produk Jepang ke sejumlah negara di Asia yang menerima bantuan luar negeri Jepang melalui cara tersebut, yang mana pengenalan akan produk Jepang ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan permintaan akan produk tersebut di masa yang akan datang, seiring dengan berkembangnya pasar yang ada.

Berikut adalah tabel yang memaparkan mengenai jumlah bantuan reparasi perang Jepang yang disalurkan ke sejumlah negara-negara yang menjadi ‘korban kolonialisme’ Jepang.

Tabel 4.1 Negara Penerima Biaya Reparasi-Perang Jepang, Periode beserta Jumlahnya (dalam Juta Dollar AS)

Negara	Tahun Persetujuan	Jumlah Biaya	Periode Pembayaran
Burma	1954	340	1955-1965

Thailand	1955	26,7	1962-1970
Filipina	1956	550	1956-1966
Indonesia	1958	223	1958-1970
Laos	1958	2,8	1959-1961
Kamboja	1959	4,2	1959-1961
Vietnam Selatan	1959	390	1960-1965
Korea Selatan	1965	300	1965-1975
Singapura	1967	8,2	1968-1972
Malaysia	1967	8,2	1968-1972
Micronesia	1969	5,9	1973-1976
Vietnam	1975	8,5	1975-1978
Mongolia	1977	5	1977-1981

Sumber: David Arase, 1995, *Buying Power: The Political Economy of Japan's Foreign Aid*⁶³

Pasca 1950-an merupakan periode dimana penyaluran ODA Jepang mengalami peningkatan (secara kuantitas), khususnya dalam bentuk pinjaman yang dimana sebagai akibat dari adanya surplus perdagangan dalam neraca perdagangannya. Dalam periode ini, Jepang mulai mempromosikan pembangunan regional yang dipusatkan pada wilayah Asia Tenggara. Salah satunya ialah dengan mendirikan *Overseas Economic Cooperation Fund* (OECF) pada tahun 1960 dengan dana 5 milyar Yen yang diambil dari *Southeast Asia Development Cooperation Fund*, dengan fungsi selain untuk mendukung kinerja bank ekspor-impor Jepang, juga berfungsi sebagai sumber dana pinjaman lunak bagi negara-negara berkembang. Untuk pelaksanaannya, didirikanlah *Overseas Technical Cooperation Agency* (OTCA) pada tahun 1964, yang nantinya diubah menjadi *Japan International*

⁶³ David Arase, 1995, *Buying Power: The Political Economy of Japan's Foreign Aid*, diakses dari <https://doi.org/10.1177/03058298960250010904> pada 20 November 2019

Cooperation Agency (JICA) pada tahun 1974, sebagai pelaksana bantuan kerjasama teknis di lapangan.⁶⁴

Dalam perkembangannya, Jepang mengalami stagnasi ekonomi pada periode 1990-an, sebagai akibat dari pecahnya ekonomi gelembung Jepang.

Hal inilah yang nantinya akan menjadi faktor utama (faktor ekonomi) bagi penurunan jumlah ODA Jepang yang disalurkan ke negara Asia Tenggara, selain karena faktor krisis Finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998. Selain itu, adanya desakan dari dalam maupun luar kepada Jepang untuk segera mereformasi ODA-nya, terutama terkait dengan kinerja (tujuan dan filosofi) dan proses pembentukan atau perumusan dari kebijakan ODA itu sendiri, yang dinilai tidak transparan, yakni dengan dibuatnya *Japan's ODA Charter 1992* lalu disempurnakan dalam *Japan's ODA Charter 2003*.

Pada tahun 1997, terjadi krisis finansial yang menghantam ekonomi sejumlah negara di Asia, yang dimulai dari pelemahan mata uang Bath Thailand, dan kemudian merambat ke negara-negara sekitarnya, bahkan sampai ke Korea Selatan. Sekalipun Jepang tidak secara langsung terkena efek buruk dari krisis yang terjadi pada tahun 1997 tersebut, namun ada dua hal yang mendorong Jepang untuk ikut membantu mengatasi masalah krisis ini. Pertama, karena negara-negara yang terkena dampak krisis terparah pada tahun 1997 seperti Indonesia, Thailand, dan juga Korea Selatan merupakan negara-negara yang berharga di mata Jepang, khususnya dalam hal

⁶⁴ *Ibid*,

perdagangan dan investasi. Serta kedua, adanya tekanan internasional yang menilai Jepang seakan-akan 'lepas tangan' dan tidak peduli, padahal seperti yang selama ini diketahui bahwa Jepang sering kali dipandang sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah Asia. Oleh karena itu, Jepang mengeluarkan dua kebijakan dalam mengatasi krisis yang terjadi pada tahun 1997 itu, yakni dengan mendirikan *Asian Monetary Fund* (AMF) dan mengeluarkan kebijakan *New Miyazawa Plan* yang akan mengalokasikan dana sebesar 30 milyar Dollar AS, untuk membantu negara-negara Asia yang terkena dampak krisis, dan jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 80 milyar Dollar AS.

4.2 Bantuan Luar Negeri Jepang di Indonesia

Jepang merupakan negara pendonor terbesar di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara dan salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dianggap 'berharga' oleh Jepang. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara maritim yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Asia, Indonesia juga dinilai 'berharga' oleh Jepang dikarenakan letak geografisnya yang berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang menjadikan Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang

berkembang. Misalnya antar Jepang, Korea, dan RRC dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa.⁶⁵

Dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Indonesia sehingga negara Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang mendapat bantuan luar negeri ODA Jepang terbesar. Selain karena letak geografis dan status Indonesia yang merupakan negara maritim dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki pertumbuhan penduduk yang signifikan. Sehingga bagi Jepang menjadi partner dagang Indonesia yang memiliki lebih dari 200 juta jumlah penduduk merupakan suatu keuntungan.

Setelah kewajiban pembayaran 'ganti rugi' perang selesai dibayarkan oleh pemerintah Jepang kepada Indonesia, pilihan untuk meningkatkan kerjasama di bidang investasi dengan Indonesia dinilai Jepang menjadi opsi yang menguntungkan. Hal ini dibuktikan dengan data yang memperlihatkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara penerima investasi atau *Foreign Direct Investment* (FDI) atau bantuan luar negeri Jepang terbesar. Salah satunya dapat dilihat dari total investasi Jepang di Indonesia antara tahun 1967-1990 dalam sektor non-minyak, yang mencapai 7,9 milyar Dollar AS, mengalahkan investasi Amerika Serikat (tanpa sektor minyak) sebesar 2 milyar Dollar AS, dan Belanda yang hanya sebesar 1,5 milyar Dollar AS.⁶⁶

⁶⁵ *Loc. Cit.*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

⁶⁶ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2013, *Jepang Investor Nomor Satu*, diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/6113/jepang-Investor-Nomor-Satu> pada 22 November 2019

Gambar 4.1 Tren Bantuan Jepang di Indonesia



Sumber : Indonesia Development-JICA⁶⁷

Selain itu jika dilihat dari tren bantuan Jepang di Indonesia dalam akumulasi angka dapat tergambarkan dari gambar data di atas. Dimana jika diakumulasikan bantuan Jepang ke Indonesia hingga tahun 2016, Jepang telah memberikan bantuan dengan jumlah akumulasi lebih dari 5,5 triliun yen

⁶⁷ Japan International Cooperation Agency, 2018, *Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan*, diakses dari https://www.jica.go.jp/publication/pamph/region/ku57pq00002izqzn-att/indonesia_development_ind.pdf, pada 18 Desember 2019, hlm. 3



(sekitar 668 triliun rupiah atau USD 49,5 miliar*⁶⁸). Dan bagi Indonesia sendiri, Jepang merupakan negara pemberi bantuan bilateral terbesar, sedangkan bagi Jepang, Indonesia merupakan negara penerima ODA terbesar (berdasarkan akumulasi).⁶⁹

Dimana tren bantuan luar negeri yang diberikan Jepang ke Indonesia hingga tahun 2018 terakhir meliputi bantuan pembangunan kereta bawah tanah atau *Mass Rapid Transit* (MRT) pertama di Indonesia, pembangunan jalan lintas Sumatera dan jalan tol di wilayah Jakarta yang mana 60% dari pembangunan tersebut merupakan bantuan dari Jepang, pembangunan fasilitas tenaga pembangkit listrik untuk 20% total kapasitas listrik di Indonesia, buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang disosialisasikan sejak tahun 2016 kepada sekitar 80% ibu (hamil, bersalin, dan nifas) di seluruh Indonesia, bantuan tepat waktu saat terjadi bencana alam berskala besar, bantuan untuk konservasi lingkungan alam dan penanggulangan perubahan iklim, dan bantuan pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Beberapa bantuan yang diberikan Jepang tersebut tidak terlepas dari campur tangan langsung pemerintah Jepang di dalamnya.

Selain Jepang, Indonesia juga menerima bantuan luar negeri dari beberapa negara maju lainnya, seperti negara Australia, Korea, Uni Eropa dan Amerika. Australia menganggarkan sekitar 375,7 juta Dollar Australia yang setara dengan 3 milyar Rupiah untuk total bantuan pembangunan luar negeri

⁶⁸ *Ibid*,

⁶⁹ *Ibid*,

Australia ke Indonesia.⁷⁰ Namun bedanya program bantuan yang diberikan ke Indonesia oleh Australia dengan Jepang adalah pada fokus sasaran pembangunannya. Dimana Australia fokus pembangunannya lebih kepada banyaknya program beasiswa yang diberikan oleh warga negara Indonesia, sedangkan Jepang fokus pembangunannya lebih kepada perbaikan dan perkembangan infrastruktur dan teknologi.

Selain Australia, ada juga negara Amerika yang memberikan bantuan dana hibah kepada Indonesia. Melalui program bantuan *Hibah Compact* milik Amerika Serikat, Indonesia mendapat dana hibah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁷¹ Namun bantuan hibah yang diberikan oleh Amerika Serikat ke Indonesia berbeda dengan bantuan hibah yang diberikan oleh Jepang, dimana yang membedakannya adalah fokus sasaran dari bantuan hibah tersebut.

Dimana bantuan dana *hibah compact* tersebut difokuskan untuk membiayai tiga proyek, seperti Kemakmuran Hijau, Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting, dan Modernisasi Pengadaan.⁷² Selain itu Amerika Serikat juga memberikan hibah pesawat tempur kepada Indonesia. Beberapa sasaran fokus bantuan Amerika Serikat ini berbeda dengan Jepang, yang mana Jepang lebih berfokus pada bantuan pembangunan infrastruktur dan perkembangan teknologi Indonesia.

⁷⁰ Kedutaan Besar Australia Indonesia, *Ikhtisar Program Bantuan Australia Untuk Indonesia*, diakses dari <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation-programs.html> pada 18 Desember 2019

⁷¹ Millenium Challenge Account-Indonesia, *Hibah Compact*, diakses dari http://www.mca-indonesia.go.id/id/about_us/compact_grant pada 18 Desember 2019

⁷² *Ibid*,

Seiring dengan perkembangannya, hubungan kerjasama yang terjalin antara Jepang dan Indonesia makin terjalin cukup harmonis dan terjalin pada berbagai sektor pembangunan kerjasama lainnya seperti pada proyek pembangunan industri, investasi asing dalam sektor non-minyak dan investasi asing pada sektor otomotif di Indonesia yang sempat menguasai pasara pada tahun 2017. Selain itu hubungan antara Jepang dan Indonesia juga terjadi dalam sektor kemaritiman yang mana ditandai dengan ditandatanganinya *Exchange of Notes on the Integrated Marine and Fisheries Centers and Fish Market* pada 25 Juni 2018 dalam kerjasama maritim antara Jepang dan Indonesia.⁷³

Dengan ditandatanganinya *Exchange of Notes on the Integrated Marine and Fisheries Centers and Fish Market* ini menjadi awal mula hubungan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia pada sektor maritim khususnya sektor perikanan di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Jepang juga berjanji akan membantu Indonesia dalam pembangunan pelabuhan di pulau-pulau terluar Indonesia yang tersebar di sekitar Laut Cina Selatan (LCS) dan Selat Malaka, termasuk mendirikan pasar nelayan di pulau-pulau terluar tersebut. Dalam kesempatan itu juga, kedua Menteri Luar Negeri dari kedua negara tersebut juga sepakat untuk mensinergikan konsep Indo-Pasifik yang diinisiasi Indonesia dengan konsep *Free and Open Indo-Pacific Strategy* dari Jepang.

⁷³ *Loc. Cit.*, Indah Gilang Pusparani

Lewat *Free and Open Indo-Pacific Strategy* ini, Jepang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan memperkuat tatanan maritim yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum di seluruh wilayah Indo-Pasifik, untuk membuat wilayah ‘barang publik internasional’ yang secara merata membawa stabilitas dan kemakmuran bagi semua negara negara di kawasan ini. Lebih khusus lagi, Jepang bergerak maju pada aktualisasi strategi ini dengan memajukan upayanya pada tiga pilar, yaitu: (i) promosi dan pembentukan aturan hukum, kebebasan navigasi, dan perdagangan bebas; (ii) mengejar kemakmuran ekonomi melalui peningkatan konektivitas, termasuk melalui pengembangan ‘infrastruktur berkualitas’ sesuai dengan standar internasional; dan (iii) inisiatif untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang mencakup bantuan untuk pengembangan kapasitas penegakan hukum maritim, anti-pembajakan, dan pengurangan resiko bencana.⁷⁴

Salah satu bentuk kerjasama Jepang-Indonesia pada sektor kemaritiman adalah melalui bantuan luar negeri yang diberikan Jepang melalui JICA pada proyek pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia, yaitu Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, dan Biak. Yang mana letak pulau ini berdekatan dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Sebagai salah satu negara maritim yang kaya akan potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun

⁷⁴ *Op. Cit.*, Ministry of Foreign Affairs Japan

atau 8,2% dari total produksi ikan laut dunia.⁷⁵ Indonesia dinilai masih belum mampu mengolah kekayaan laut tersebut dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan rendah dari para nelayan yang menangkap ikan di laut jika dibandingkan dengan pendapatan pembudidaya ikan di perairan umum dan di tambak.

Sehingga melalui dana hibah yang diberikan oleh Jepang pada Indonesia dalam proyek pembangunan SKPT ini sangat memberikan dampak yang besar bagi hasil produksi ikan laut di Indonesia. Dimana yang diketahui bahwa dari ke 6 pulau yang menjadi sasaran penyaluran hibah Jepang dalam pengembangan proyek SKPT ini merupakan wilayah perairan laut Indonesia yang memiliki kekayaan potensi produksi lestari ikan laut yang melimpah.

Jepang memberikan dana hibah dinilai 2,5 milyar Yen atau sekitar 324 juta Rupiah untuk program pembangunan sektor perikanan untuk pulau-pulau terluar Indonesia.⁷⁶ Yang mana bantuan tersebut disalurkan pada pengembangan SKPT di setiap pulau terluar Indonesia. Bantuan ini disepakati lewat penandatanganan naskah perjanjian antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Prabowo dan delegasi JICA untuk Indonesia, Shinichi Yamanaka di Gedung Mina Bahari I, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018.⁷⁷

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti juga mengatakan bahwa dana hibah yang diberikan oleh Jepang pada proyek ini merupakan

⁷⁵ *Op. Cit.*, Doksileg Dewan Perwakilan Rakyat RI

⁷⁶ *Loc. Cit.*, Lily Aprilia Pregiawati

⁷⁷ *Ibid*,

bantuan dan hibah terbesar sepanjang sejarah Jepang.⁷⁸ Dimana bantuan ini merupakan bantuan dana hibah terbesar, khususnya pada bidang Kemaritiman Perikanan. Beliau juga mengatakan bahwa baru pertama kali Jepang sangat antusias dalam memberikan dana hibah yaitu melalui proyek pembangunan SKPT ini.

4.3 Bantuan Jepang dalam Proyek Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Tahun 2018

Hubungan antara Jepang dan Indonesia juga dalam sektor kemaritiman pertama kali ditandai dengan ditandatanganinya *Exchanges of Notes on the Integrated Marine and Fisheries Centers and Fish Market* pada 25 Juni 2018 dalam kejasama maritim antara Jepang dan Indonesia.⁷⁹ Dimana melalui penandatanganan *Exchanges of Notes on the Integrated Marine and Fisheries Centers and Fish Market* ini menjadi awal mula hubungan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia pada sektor maritim khususnya sektor perikanan di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Jepang juga berjanji akan membantu pembangunan pelabuhan di pulau-pulau terluar Indonesia yang tersebar di sekitar Laut Cina Selatan (LCS) dan Selat Malaka, termasuk mendirikan pasar nelayan di pulau-pulau terluar tersebut, yang mana dana yang disalurkan oleh JICA dalam pembangunan proyek Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) ini merupakan dana hibah 100 persen berupa investasi sebesar 6 milyar Yen atau setara dengan 775,1 milyar Rupiah untuk program pengembangan SKPT

⁷⁸ *Loc. Cit.*, Eduardo Simorangkir

⁷⁹ *Loc. Cit.*, Indah Gilang Pusparani

pada sektor perikanan untuk masing-masing pulau-pulau terluar Indonesia.⁸⁰

Rencana itu menjadi bagian dari *Exchange Note* tentang Pusat Kelautan dan Perikanan dan Pasar Ikan Terintegrasi (*Integrated Marine and Fisheries Center and Fish Market*) yang ditandatangani pemerintah Jepang dan Indonesia.⁸¹ Bantuan ini merupakan bantuan hibah terbesar Jepang pada sektor kemaritiman-perikanan yang pernah diberikan kepada Indonesia.

Dimana sebelumnya Jepang dalam pemberian bantuan luar negerinya tidak pernah memberikan dana hibah 100 persen kepada negara resipiennya, melainkan bantuan luar negeri yang diberikan Jepang didominasi pada bantuan dana pinjaman atau utang kepada negara resipiennya.

Dalam kesempatan itu juga, kedua Menteri Luar Negeri dari kedua negara itu juga sepakat untuk mensinergikan konsep Indo-Pasifik yang diinisiasi Indonesia dengan konsep *Free and Open Indo-Pasific Strategy* dari Jepang. Lewat *Free and Open Indo-Pasific Strategy* ini, Jepang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan memperkuat tatanan maritim yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum di seluruh wilayah Indo-Pasifik, untuk membuat wilayah ‘barang publik internasional’ yang secara merata membawa stabilitas dan kemakmuran bagi semua negara negara di kawasan ini. Lebih khusus lagi, Jepang bergerak maju pada aktualisasi strategi ini dengan memajukan upayanya pada tiga pilar, yaitu; (i) promosi dan pembentukan aturan hukum, kebebasan navigasi, dan perdagangan bebas; (ii) mengejar

⁸⁰ Esther Christine Natalia, 2018, *KKP Dapat Bantuan 775 M dari Jepang*, CNBC Indonesia, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180625163613-4-20377/kkp-dapat-bantuan-rp-775-m-dari-jepang> pada 14 Desember 2019

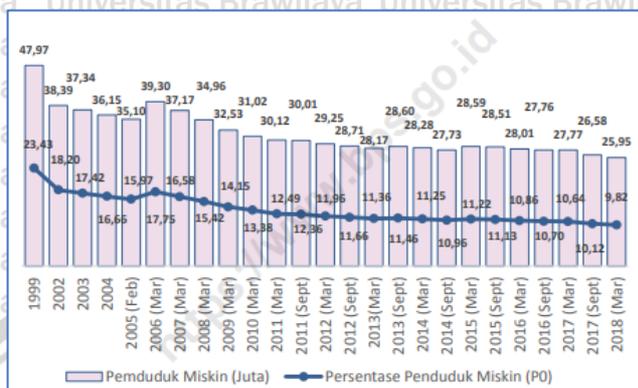
⁸¹ *Ibid*,

kemakmuran ekonomi melalui peningkatan konektivitas, termasuk melalui pengembangan ‘infrastruktur berkualitas’ sesuai dengan standar internasional; dan (iii) inisiatif untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang mencakup bantuan untuk pengembangan kapasitas penegakan hukum maritim, anti-pembajakan, dan pengurangan resiko bencana.⁸²

Dalam rangka untuk mencapai tujuannya lewat *Free and Open Indo-Pacific Strategy* ini, Jepang memberikan bantuan luar negerinya pada proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia dengan mengalokasikan dana bantuan luar negerinya yang didasari oleh beberapa fokus pembangunan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) pada proyek pembangunan SKPT tersebut, yang mana memiliki tujuan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan kondisi negara Indonesia yang lebih makmur, stabil dan tertata dengan baik khususnya pada sektor kelautan dan perikanan.

⁸² *Op. Cit.*, Ministry of Foreign Affairs Japan, hlm. 2

Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber : BPS Indonesia⁸³

Namun dari data statistik di atas dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Indonesia sudah menurun, hal itu membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia sendiri sudah mampu menanggulangi permasalahan kemiskinan di negaranya. Dalam keadaan seperti ini, Jepang memberikan bantuan dana hibah yang besar dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia, padahal Indonesia sendiri sudah mampu memperbaiki tingkat perekonomiannya. Dimana hal tersebut dibuktikan dari data statistik di atas yang menunjukkan menurunnya tingkat kemiskinan penduduk Indonesia hingga tahun 2018 terakhir.

Dalam keadaan inilah penulis melihat bahwa dalam pemberian bantuan luar negeri oleh Jepang ke Indonesia, selain untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki tingkat perekonomiannya, Jepang juga memiliki

⁸³ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2018*, diakses dari <https://bps.go.id/publication/download.html?nrbyfeve=NzhkNDQ5ZWRkYWFKODkyZTM4M2I3ZmQ5&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmklL3B1YmtpY2F0aW9uLzIwMTgvMTIvMjEvNzhkNDQ5ZWRkYWFKODkyZTM4M2I3ZmQ5L3BlbmdoaXR1bmdhbi1kYW4tYW5hbGlzaXMta2VtaXNraW5hbi1tYWtyby1kYW4taW5kb25lc2IhLXRhaHVuLTlwMTgvaHRtbA%3D%3D&twoadfnorfeauf=MjAxOS0xMi0xOSAxMzoxODozMg%3D%3D> pada 18 Desember 2019



kepentingan tersendiri yang ingin dicapai dalam pemberian bantuan luar negerinya, khususnya pada proyek pembangunan SKPT ini.

Dari dana bantuan yang diberikan Jepang tersebut pada proyek pembangunan SKPT ini terdapat beberapa fokus pembangunan didalamnya, seperti membangun dan meningkatkan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di 6 pulau terluar Indonesia yang menjadi sasaran bantuan JICA, serta aktivitas bantuan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan maritim negara dan masyarakat pesisir sekitar, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan penangkapan ikan dan standar hidup masyarakat nelayan melalui peningkatan kualitas produk perikanan dan distribusinya di luar pulau-pulau tersebut.⁸⁴

Untuk aktivitas bantuan dengan fokus untuk membangun dan meningkatkan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di 6 pulau terluar Indonesia yang menjadi sasaran bantuan JICA, dicapai dengan cara memperbaiki dan memperlengkapi pelabuhan dan pasar ikan di 6 pulau terluar Indonesia dengan fasilitas-fasilitas canggih dari Jepang, seperti pembangunan *cold storage*, *processing*, instalasi pengolahan, tempat pendaratan ikan, dan pemberhentian kapal, serta *ice flake machine* berkapasitas 10 ton juga akan disiapkan.⁸⁵

Selain dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas canggih yang dihibahkan oleh Jepang ke Indonesia, proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia

⁸⁴ *Loc. Cit.*, KKP News

⁸⁵ *Ibid*,

ini juga dikerjakan langsung oleh para pekerja dari Jepang, dimana model pembangunan proyek SKPT ini juga mengadopsi model pembangunan Jepang. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan akhir dari pembangunan proyek SKPT ini, yaitu diharapkan para nelayan kecil di Indonesia dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan dengan pendingin (*cold storage*) dan pembuatan es, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan penangkapan ikan dan standar hidup masyarakat nelayan melalui peningkatan kualitas produk perikanan dan distribusinya di luar pulau-pulau tersebut.

Dari beberapa penjelasan mengenai alokasi bantuan Jepang pada proyek pembangunan SKPT tersebut dapat terlihat adanya upaya Jepang untuk mencapai tujuannya yang ada pada konsep *Free and Open Indo-Pacific Strategy* yang tercantum pada tiga pilar tujuan didalamnya.

Pada pilar tujuan yang pertama Jepang berfokus pada pembentukan dan promosi aturan hukum, kebebasan navigasi dan perdagangan bebas dapat terlihat pada upaya pengalokasian bantuan JICA dalam proyek pembangunan SKPT dengan mengadopsi model pembangunan Jepang dan mendatangkan langsung para pekerja dari Jepang untuk mengerjakan proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia ini. Dengan diperkerjakannya para pekerja dari Jepang, hal itu akan membuat bebasnya dan navigasi Jepang terhadap pemerintah Indonesia khususnya pada proyek pembangunan SKPT ini. Selain itu dengan mengadopsi model pembangunan dari Jepang pada proyek

pembangunan SKPT ini, otomatis tujuan Jepang dalam pembentukan dan promosi aturan hukum dapat tercapai.

Selain itu, pada pilar tujuan yang kedua Jepang berfokus untuk mengejar kemakmuran ekonomi melalui peningkatan konektivitas, termasuk melalui pengembangan 'infrastruktur berkualitas' sesuai dengan standar internasional, fokus ini dicapai dengan memfasilitasi proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia melalui pemberian alat-alat canggih dari Jepang seperti *cold storage*, *processing*, instalasi pengolahan, tempat pendaratan ikan, dan pemberhentian kapal, serta *ice flake machine*.⁸⁶

Lalu pada pilar tujuan yang ketiga Jepang berfokus pada inisiatif untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang mencakup bantuan untuk pengembangan kapasitas penegakkan hukum maritim, anti-pembajakan, dan pengurangan resiko bencana yang mana hal ini dapat dicapai Jepang dalam proyek pembangunan SKPT ini dengan membantu dan memantau secara langsung proses pembangunan proyek SKPT di 6 pulau terluar Indonesia ini.

⁸⁶ *Ibid*,

Gambar 4.3 SKPT Prioritas 2017



Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional⁸⁷

Dari gambar diatas tersebut dapat terlihat 12 titik kawasan yang menjadi prioritas pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Indonesia, dimana dari ke-12 titik kawasan prioritas Indonesia tersebut ada 6 titik kawasan pembangunan SKPT, yaitu pulau Natuna, Morotai, Sabang, Saumlaki, Moa dan Biak yang mendapatkan bantuan luar negeri JICA.

Penulis melihat bahwa ke-6 titik kawasan pembangunan SKPT yang mendapat bantuan luar negeri dari JICA merupakan kawasan strategis bagi Jepang, mulai dari kekayaan hasil lautnya seperti ikan tuna dan udang sampai

⁸⁷ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017, *SKPT: Membangun Indonesia Dari Pinggiran*, diakses dari <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/skpt-membangun-indonesia-dari-pinggiran-66967> pada 5 Desember 2019

letak strategis dari ke-6 titik kawasan tersebut yang berdekatan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.



BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap kasus yang telah diambil dalam penulisan skripsi, yaitu terkait dengan motif bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia melalui JICA dalam proyek pembangunan SKPT, dengan ruang lingkup data penelitian pada tahun 2017-2018. Untuk menganalisis kasus tersebut penulis akan menggunakan konsep motif bantuan luar negeri dari David Sogge. Penulis akan melakukan analisis dengan mendeskripsikan indikator-indikator yang terdapat dalam konsep tersebut untuk mengelompokkan data yang dianalisis.

Konsep bantuan luar negeri milik David Sogge lebih berfokus untuk menjelaskan motif negara dalam memberikan bantuan luar negeri secara umum, namun dalam penelitian penulis menggunakan konsep motif bantuan luar negeri milik David Sogge tersebut untuk menganalisis motif suatu negara dalam memberikan bantuan luar negerinya terhadap suatu proyek pembangunan secara khusus, dalam hal ini proyek pembangun SKPT di 6 pulau terluar Indonesia.

Penulis memilih konsep motif bantuan luar negeri milik David Sogge tersebut untuk menganalisis studi kasus yang diambil penulis dalam penelitian ini dikarenakan sepemahaman penulis indikator-indikator yang ada didalam konsep motif bantuan luar negeri milik David Sogge tersebut dapat membantu penulis untuk menjelaskan dan menganalisis motif pemberian bantuan luar negeri Jepang melalui JICA dalam proyek pembangunan SKPT pada tahun 2018.

5.1 Motif Bantuan Luar Negeri

Bantuan Luar Negeri merupakan salah satu aspek kebijakan yang penting bagi pemerintahan Jepang. Dimana melalui pemberian bantuan luar negeri ini pemerintahan Jepang menggunakannya sebagai salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan utama Jepang dalam pemberian bantuan luar negerinya yang tertera dalam *Japan's ODA Charter* yaitu untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan pembangunan komunitas internasional serta menjamin adanya kemakmuran dan keamanan untuk Jepang.⁸⁸ Dimana dari tujuan tersebut dapat terlihat bahwa pemberian bantuan luar negeri yang diberikan Jepang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sehingga kemudian bantuan luar negeri menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan luar negeri Jepang dan memiliki berbagai motif kuat sebagai alasan pemberian bantuan luar negeri terhadap negara resipiennya.

5.1.1 *Socio-political Motives*

Motif sosio-politik merupakan salah satu motif politik yang dimiliki Jepang dalam pemberian bantuan luar negerinya kepada negara resipiennya. Dimana dalam konsep motif bantuan luar negeri yang dijelaskan oleh David Sogge bahwa *socio-political motives* atau motif sosial politik merupakan motif yang dimiliki oleh negara pendonor terhadap negara resipiennya yang berisi kepentingan politik dari negara pendonor dalam mempengaruhi pemberian bantuan luar negerinya.

Dengan kata lain, motif ini merupakan salah satu upaya negara

⁸⁸ *Op. Cit.*, Government of Japan Ministry of Foreign Affairs Economic Co-operation Bureau

pendonor untuk menjaga pengaruh diplomatiknya dengan negara resipiennya.

Dalam hal ini, hubungan kerjasama politik antara Jepang dan Indonesia sudah terjalin cukup lama dan terjalin pada berbagai bidang kerjasama. Hubungan kedua negara ini dimulai sejak berakhirnya masa kolonialisasi Jepang di Indonesia yang mana pada saat itu Jepang memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia atas dasar 'ganti rugi' pasca perang dunia kedua. Sejak saat itu, hubungan antara Jepang dan Indonesia terus berlanjut dan terjadi pada berbagai sektor bidang kerjasama, dikarenakan ketertarikan Jepang terhadap Indonesia yang melihat Indonesia sebagai mitra kerjasama yang penting bagi kepentingan nasional Jepang.

Hubungan kerjasama yang terjalin di antara Jepang dan Indonesia terjadi pada berbagai bidang atau sektor pembangunan, seperti pembangunan perindustrian, otomotif, pembangunan sosial ekonomi dan pada bidang kemaritiman khususnya di sektor perikanan. Dimana hubungan kerjasama yang terjadi di antara kedua negara ini pada sektor perikanan merupakan bantuan luar negeri Jepang pertama kali yang diberikan pada Indonesia, yaitu melalui pembangunan proyek SKPT yang dimulai dan disepakati pada tahun 2018 silam.

Dalam sub-bab ini, penulis akan menganalisis motif sosio-politik Jepang dalam pemberian bantuan luar negerinya ke Indonesia pada proyek pembangunan SKPT ini dengan menggunakan indikator-

indikator dari *socio-political motives* yaitu *influence on decision making, regular access, dan doctrine*.

5.1.1.1 Influence on Decision Making

Dengan adanya proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk sektor perikanan, pemerintah Jepang dapat mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dalam manajemen sumber daya kelautan yang sesuai dengan program bantuan *Japan International Cooperation Agency* (JICA), untuk mencapai tujuan yang ingin didapatkan dan dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa syarat yang diberikan oleh pemerintah Jepang pada pemberian bantuan luar negerinya terhadap proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia yang mengharuskan orang-orang Jepang terlibat langsung dalam pembangunan SKPT tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan proyek pembangunan SKPT ini, Jepang mengharuskan Indonesia untuk mengadopsi model pembangunan Jepang.

Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam proyek pembangunan dan pengembangan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia yaitu mulai dari penggunaan *ice flake machine, cold storage*, dan beberapa teknologi canggih dari Jepang serta perbaikan konstruksi kapal patroli, kapal ikan

serbaguna untuk menunjang pengawasan dan *controlling* di sekitar kawasan tersebut yang mana semua teknologi tersebut berasal dari Jepang.⁸⁹

Selain berbagai alat fasilitas yang disediakan dalam proyek pembangunan dan pengembangan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia berasal dari Jepang, para pekerja dalam proyek SKPT ini juga berasal dari Jepang.

Sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya bahwa proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia ini disiapkan untuk tahun 2020 mendatang.⁹⁰ Dengan kata lain, penulis melihat bahwa setelah pembangunan proyek SKPT ini diselesaikan pada tahun 2020 mendatang, ada tujuan dan target yang hendak dicapai oleh Jepang.

Gambar 5.1 Sasaran, Indikator, dan Target Narasi RPJMN 2020-2024

4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan	1. Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*)	22,0 juta ha	24,5 juta ha
		2. Pengelola WPP (14.2.1(b))	11 unit	11 unit
		3. Integrasi Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Zonasi (RZ) serta penyelesaian perencanaan tata ruang laut dan zonasi pesisir	0 RTRW RZ	10 RTRW RZ
		4. Pemetaan bathimetri prioritas skala 1:50.000	63%	100%
		5. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*)	64%	80%
		6. Produksi ikan	15,5 juta ton	19,6 juta ton
		7. Produksi rumput laut	15,8 juta ton	20,0 juta ton
		8. Produksi garam	3,0 jutaan ton	3,8 juta ton

Sumber: Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024⁹¹

⁸⁹ *Loc. Cit.*, Lily Aprilia Pregiwati

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Bappenas RI, *Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-3024*, diakses dari

Melihat dari gambaran tabel sasaran, indikator, dan target

narasi rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diatas, pada poin 4

dapat dilihat bahwa salah satu sasaran dan target dari

pembangunan Indonesia pada tahun 2020 mendatang adalah

untuk meningkatkan pengelolaan kemaritiman dan kelautan,

salah satunya pada produksi perikanan yang ditargetkan

mencapai 15,5 juta ton pada tahun 2020 mendatang.⁹²

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat bahwa dimungkinkan

adanya kesamaan kepentingan antara tujuan pemberian bantuan

luar negeri Jepang dalam proyek pembangunan SKPT dengan

terbentuknya narasi RPJMN 2020-2024 yang ada pada poin 4

tersebut yang berbunyi “peningkatan pengelolaan kemaritiman

dan kelautan”. Yang mana kesamaan kepentingan menurut

penulis dimungkinkan sebagai bentuk pengaruh Jepang dalam

pembuatan kebijakan Indonesia.

https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf pada 27 November 2019, hlm. 45

⁹² *Ibid*,

Gambar 5.2 Sasaran, Indikator, dan Target Narasi RPJMN 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		1. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa	5,26-6,61%	6,87-8,36%
		2. Pertumbuhan ekspor nonmigas	7,48-9,13%	10,45-13,05%
		3. Nilai ekspor produk perikanan	USD 6,17 miliar	USD 7,94 miliar
		4. Nilai ekspor produk industri kehutanan	USD 2,4 miliar	USD 3,5 miliar
		5. Pertumbuhan ekspor pertanian	9-10%	9-10%
		6. Kontribusi ekspor industri	49,0-50,0%	58,0-65,0%
		7. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	10,8-11,0%	13,0-15,0%
		8. Rasio ekspor jasa terhadap PDB	2,8-2,9%	3,6-3,7%
		9. Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c))	USD 19-21 miliar	USD 28-34 miliar
		10. Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a))	18,5 juta orang	25-28 juta orang
8	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	11. Nilai ekspor ekonomi kreatif	USD 21,5-22,6 miliar	USD 24,5-25,8 miliar
		12. Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN	1.000 produk per tahun	1.000 produk per tahun
		13. Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b))	310 juta perjalanan	350-400 juta perjalanan
		14. Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global	3 Sektor	5 Sektor
		15. Jumlah promosi <i>Tourism, Trade and Investment</i> (TTI) terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi
		16. Jumlah negara akreditasi yang meningkat nilai perdagangan	90 negara	98 negara
		17. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	70 negara	78 negara
		18. Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional	4 ratifikasi	4 ratifikasi
		19. Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	5%	5%

Sumber: Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024⁹³

Selain pada poin 4 dalam narasi RPJMN 2020-2024, dari gambar diatas tersebut juga dapat dilihat pada sasaran RPJMN 2020-2024 yang ada pada poin 8 mengenai peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan salah satunya pada peningkatan ekspor perikanan yang ditargetkan mencapai 6,17 milyar Dollar AS pada tahun 2020 mendatang.⁹⁴ Dari hal inilah penulis melihat bahwa adanya kemungkinan pembentukan sasaran, indikator dan target yang ada didalam narasi RPJMN tahun 2020-2024 khususnya pada poin 4 dan poin 8 dipengaruhi oleh

⁹³ Ibid, hlm. 48

⁹⁴ Ibid,

pemberian bantuan luar negeri Jepang pada proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia yang disiapkan untuk tahun 2020 mendatang.

Gambar 5.3 Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024



Sumber: Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024⁹⁵

Dari gambar diatas juga dapat dilihat arah kebijakan dan startegi RPJMN 2020-2024 salah satunya adalah untuk meningkatkan pengelolaan kemaritiman dan kelautan yang mana terdapat 6 poin didalamnya, dimana 6 poin tersebut penulis melihat adanya kesamaan isi arah kebijakan dengan tujuan dibangunnya proyek SKPT di 6 pulau terluar Indonesia

⁹⁵ Ibid, hlm. 50-51

yang pernah diungkapkan oleh Shinichi Yamanaka selaku perwakilan JICA untuk Indonesia.

Seperti meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan, meningkatkan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir, meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya, meningkatkan sumber daya manusia, riset kemaritiman dan kelautan, serta perbaikan sistem database kelautan dan perikanan.⁹⁶

Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara pengekspor utama pada sektor perikanan, khususnya untuk produksi ikan tuna dan udang ke Jepang. Dapat dilihat juga pada fokus arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 pada sektor kemaritiman dan kelautan, salah satunya adalah pengembangan komoditas utama perikanan dan kelautan mencakup komoditas udang, tuna, rumput laut, rajungan, ikan nila, serta garam akan dilakukan di provinsi-provinsi yang

⁹⁶ *Loc.Cit.*, KKP News

memiliki keunggulan kompetitif, seperti di wilayah Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Maluku dan Papua.⁹⁷

Dimana dalam hal tersebut penulis melihat adanya kemungkinan fokus arah kebijakan dan startegi RPJMN 2020-2024 tersebut akibat pengaruh dari pemberian bantuan hibah oleh JICA pada proyek pembangunan SKPT.

5.1.1.2 Regular Access

Dengan terlaksananya program bantuan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam proyek pembangunan Sentra Keluatan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia untuk sektor maritim khususnya pada bidang perikanan di Indonesia, maka Jepang akan terciptanya loyalitas pemerintah Indonesia kepada pemerintah Jepang, yaitu dengan melihat terbentuknya beberapa kerjasama lanjutan yang disepakati antara kedua negara tersebut, baik dalam sektor maritim-perikanan maupun pada sektor lainnya yang berkaitan dengan program bantuan yang diberikan.

Selain itu hal ini juga dapat dilihat dari terbentuknya naskah pembangunan kerjasama antara Jepang dan Indonesia dalam Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid*,

⁹⁸ *Loc. Cit.*, Japan International Cooperation Agency

Dalam hal ini penulis melihat dengan banyaknya beberapa kerjasama yang terjadi antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia baik di dalam program bantuan hibah atau investasi dan lainnya, akan dimungkinkan dapat terciptanya sikap loyalitas dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Jepang.

Dengan begitu, terbentuknya sikap loyal yang diharapkan oleh pemerintah Jepang dari pemerintah Indonesia, dinilai penulis sebagai tujuan dari pemerintah Jepang untuk mendapat dukungan dan keberpihakan dalam berbagai program yang dimiliki Jepang di forum-forum internasional dari pemerintah Indonesia.

5.1.1.3 Doctrine

Melalui pemberian bantuan JICA pada proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) ini, pemerintah Jepang berusaha menanamkan doktrin bantuan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan aspek perikanan, kelautan dan masyarakat.

Dimana masyarakat yang bergantung pada akses sumber daya alam khususnya pada sumber daya hasil lautnya diberdayakan dalam meningkatkan kesejahteraannya, sekaligus menjaga kondisi sumber daya alam dan ekosistem lautnya agar tetap lestari, sehingga dapat dimanfaatkan di masa mendatang.

Dalam hal ini penulis melihat adanya kemungkinan pemanfaatan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem laut Indonesia oleh Jepang. Hal ini didasari dengan status Jepang sebagai negara tujuan ekspor pertama Indonesia, khususnya pada hasil perikanan.

Jika Indonesia kurang bisa merawat kelestarian sumber daya alam dan ekosistem lautnya dengan baik, maka akan berpengaruh pada hasil produksi laut, khususnya perikanan yang akan dihasilkan. Dan jika hasil produksi laut yang dihasilkan oleh Indonesia tidak dapat mencapai hasil produksi yang maksimal dan menyebabkan kerusakan ekosistem laut Indonesia maka akan mengakibatkan kelangkaan produksi ikan Indonesia.

Apabila hal tersebut terjadi (ikan langka), maka Jepang sebagai negara pengimpor utama hasil perikanan Indonesia harus membayar mahal akan hasil perikanan Indonesia. Dan penulis melihat untuk menghindari hal tersebut sangat masuk akal jika Jepang berani memberikan dana hibah yang cukup besar di dalam proyek pembangunan SKPT. Dimana dalam proyek SKPT tersebut salah satu tujuan utamanya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem laut Indonesia.

Selain itu juga, dengan pemberian bantuan luar negeri di dalam proyek pembangunan SKPT tersebut, penulis juga melihat adanya kemungkinan kepentingan Jepang yang ingin diprioritaskan menjadi negara tujuan ekspor utama hasil perikanan Indonesia.

5.1.2 Mercantile Motives

Berdasarkan pada penjelasan mengenai *mercantile motives* dalam konsep bantuan luar negeri milik David Sogge, terdapat kepentingan ekonomi yang hendak dicapai, khususnya dalam perdagangan dan investasi. Begitu juga dalam pemberian bantuan luar negeri untuk pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia oleh pemerintah Jepang melalui JICA. Untuk menjelaskan motifnya, penulis akan menggunakan indikator-indikator dalam *mercantile motives* yaitu *protect trade & investment opportunities*, dan *strategic access* pada beberapa sub-bab di bawah ini.

5.1.2.1 Protect Trade & Investment Opportunities

Pada indikator yang pertama ini, penulis melihat adanya motif kepentingan Jepang dalam pemberian bantuan luar negerinya pada proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia karena adanya kepentingan Jepang untuk mempertahankan peluang perdagangan dan investasi pada sektor maritim khususnya pada bidang perikanan di Indonesia.

Hal ini juga dilandasi atas keistimewaan Indonesia di mata Jepang, yang dinilai Indonesia sebagai salah satu mitra perdagangan maupun investasi yang dapat menguntungkan bagi Jepang.

Selain itu, pada sektor maritim khususnya pada bidang perikanan, Indonesia merupakan negara eksportir hasil laut dan perikanan yang juga merupakan mitra impor utama Jepang dalam berbagai hasil perikanan, khususnya ikan tuna dan udang.

Gambar 5.4 Total dan nilai Hasil Perikanan Indonesia

Ekspor Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2018							
Negara tujuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Berat bersih : Ton							
Jepang	12.716,3	11.921,1	11.050,0	6.191,5	6.166,9	4.335,2	2.862,8
Malaysia	26.174,2	27.756,2	25.538,0	30.721,2	25.110,9	23.384,7	26.619,4
Singapura	20.014,5	24.181,6	22.081,6	22.924,4	19.760,3	18.143,6	17.528,1
Amerika Serikat	640,0	316,8	383,2	641,6	701,1	287,8	241,5
Taiwan	3.844,6	3.057,7	2.721,2	2.669,8	2.361,7	2.041,0	1.906,9
Arab Saudi	1,1	58,2	99,0	503,2	1.131,9	886,3	809,4
Hong Kong	936,1	1.002,5	1.298,6	1.425,3	1.917,4	2.333,2	2.341,2
Tiongkok	13.919,7	8.740,4	3.202,6	461,0	1.121,3	897,9	1.725,7
Australia	571,2	710,8	457,4	552,3	432,5	378,8	367,4
Uni Emirat Arab	139,6	54,6	47,9	150,3	462,0	722,6	298,9
Lainnya	12.743,8	20.279,1	1.099,3	977,9	818,0	571,1	260,1
Jumlah	91.701,1	98.079,0	67.978,8	67.218,5	59.984,0	53.982,2	54.961,4
Nilai FOB : 000 US \$							
Jepang	89.547,1	69.251,6	59.478,0	34.144,1	32.978,6	24.978,5	16.364,1
Malaysia	34.121,2	35.821,0	34.968,3	65.104,4	31.851,0	30.745,6	35.031,9
Singapura	29.318,5	33.407,4	32.224,3	47.354,7	29.569,6	26.291,4	27.862,6
Amerika Serikat	6.200,0	3.198,5	3.355,7	5.088,2	6.567,4	2.926,4	2.520,7
Taiwan	8.702,7	8.587,1	7.775,3	6.737,4	6.293,6	5.759,8	5.614,8
Arab Saudi	12,7	136,4	352,7	2.086,7	4.766,5	3.277,9	2.820,0
Hong Kong	4.422,9	4.339,9	3.450,0	3.203,7	4.401,0	6.234,1	7.342,2
Tiongkok	7.612,6	4.975,4	2.421,3	1.148,6	3.802,7	2.741,0	4.238,4
Australia	2.200,6	4.008,3	2.550,5	3.213,0	3.451,5	3.300,4	2.236,9
Uni Emirat Arab	647,1	320,6	493,0	1.074,0	2.271,9	4.034,8	1.035,5
Lainnya	22.928,0	14.877,0	2.545,3	2.591,9	2.003,5	1.593,3	732,0
Jumlah	205.713,4	178.923,2	149.614,4	171.746,7	127.957,3	111.883,2	105.799,1

Catatan:
 Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB)
 Dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019⁹⁹

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor hasil perikanan Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Dan dari tabel diatas tersebut juga dapat dilihat bahwa impor Jepang terhadap hasil perikanan dari Indonesia memiliki total dan nilai yang menurun di setiap tahunnya.

Hal tersebut di tunjukkan dengan data yang menunjukkan penurunan total ekspor ke Jepang sehingga menunjukkan pentingnya akan proyek-proyek konservasi wilayah maritim kelautan di Indonesia seperti halnya yang dilakukan pada proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas hasil tangkapan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian baik negara maupun masyarakat yang bergantung pada hasil perikanan.

⁹⁹ Badan Pusat Statistik, 2019, *Ekspor Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2018*, diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/25/2024/ekspor-ikan-segar-dingin-hasil-tangkap-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2018.html> pada 15 Desember 2019

Gambar 5.5 Total Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia ke tahun 2018

Tabel 1. Nilai dan Volume Ekspor Produk Perikanan dan Kelautan 2018*

Komoditas	Nilai (USD)	Volume (Kg)
Udang	1,302,330,215.54	147,164,696.07
Tuna-Cakalang-Tongkol	499,951,755.15	116,909,375.79
Cumi-Sotong-Gurita	371,250,811.57	103,408,431.77
Rajungan-Kepiting	370,144,098.01	21,577,303.70
Rumput Laut	213,461,393.07	154,367,194.91
Komoditas Lainnya	766,948,739.91	258,538,363.17
TOTAL	3,524,087,013.25	801,965,365.40

Keterangan : * Data sementara per September 2018

Sumber: Website KKP¹⁰⁰

Udang, Tuna-Cakalang-Tongkol, Cumi-Sotong-Gurita,

Rajungan-Kepiting, Rumput Laut merupakan beberapa hasil laut

Indonesia yang paling banyak di ekspor ke beberapa negara,

yang mana didominasi oleh hasil laut udang dan ikan tuna, dan

dimana hasil laut ikan tuna nya didominasi oleh Jepang. Hal

tersebut dapat terlihat dari tabel diatas yang mana jumlah ekspor

udang dari Indonesia ke Jepang mencapai 1.302.330.215.54

Dollar AS atau mencapai 147.164.696.07 kg.¹⁰¹ Yang kemudian

disusul dengan jumlah ekspor ikan tuna dari Indonesia ke

Jepang yang mencapai 499.951.755.15 Dollar AS atau mencapai

116.909.375.79 kg.¹⁰²

¹⁰⁰ Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2018, *Kinerja Ekspor Produk Perikanan Indonesia Tahun 2018*, diakses dari <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/7947-kinerja-ekspor-produk-perikanan-indonesia-tahun-2018> pada 27 November 2019

¹⁰¹ *Ibid*,

¹⁰² *Ibid*,

Sehingga dari beberapa penjelasan di atas, yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor utama hasil perikanan ke Jepang dan bagaimana Jepang sangat bergantung pada hasil perikanan ke Indonesia, menurut penulis sangat masuk akal jika Jepang berani untuk menggelontorkan dana hibah dan investasi yang cukup besar pada proyek pembangunan SKPT ini.

Dari pemberian bantuan luar negerinya tersebut, penulis melihat bahwa Jepang ingin mempertahankan peluang perdagangan dan investasinya di Indonesia khususnya pada sektor kemaritiman. Selain itu penulis juga melihat adanya kemungkinan Jepang ingin tetap menjadi negara prioritas ekspor utama Indonesia untuk hasil produksi perikanannya.

5.1.2.2 *Strategic Access*

Pada indikator yang kedua dari motif merkantilis ini, menunjukkan adanya kepentingan Jepang untuk mendapatkan akses strategis khususnya pada hasil sumber daya laut perikanan Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan eksportir terbesar Jepang dalam berbagai hasil perikanan, khususnya udang dan ikan tuna.¹⁰³

Jepang sendiri merupakan salah satu negara pengimpor komoditas ikan terbesar di dunia. Dimana hal ini terlihat dari

¹⁰³ *Ibid.*

nilai neraca perdagangan komoditas ikan Jepang yang mengalami defisit, yang berarti nilai impor Jepang sudah lebih tinggi daripada nilai ekspornya. Berdasarkan data dari *UN-Comtrade* tahun 2018 terlihat bahwa neraca perdagangan ikan Jepang pada tahun 2017 mengalami defisit sebesar 20,58 milyar Dollar AS atau meningkat 9,5% dari defisit tahun 2016 yang mencapai 18,79 milyar Dollar AS.¹⁰⁴

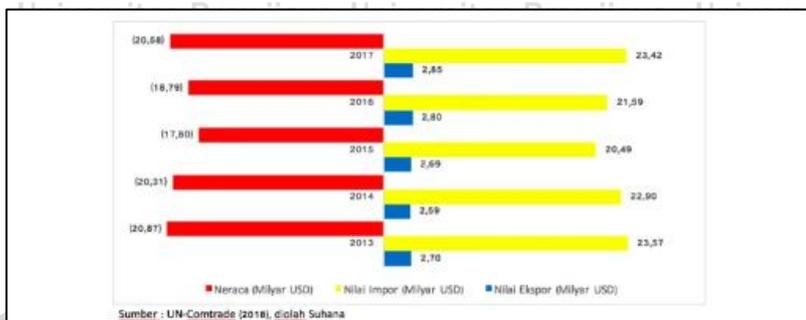
Meningkatnya jumlah defisit hasil perdagangan ikan Jepang ini dikarenakan pertumbuhan impor ikan Jepang yang cenderung terus mengalami peningkatan, sementara itu jumlah pertumbuhan ekspor ikan Jepang cenderung lebih lambat. Pada tahun 2017 pertumbuhan impor komoditas ikan Jepang mengalami peningkatan sebesar 8,48% sementara nilai ekspor hanya mengalami peningkatan sebesar 1,62%.¹⁰⁵ Secara grafis perkembangan ekspor, impor dan neraca perdagangan pada bidang perikanan Jepang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

¹⁰⁴ Data Suhana, 2018, *Melihat Perdagangan Ikan Internasional Jepang*, diakses dari <https://suhana.web.id/2018/05/12/melihat-perdagangan-ikan-internasional-jepang/> pada 15

Desember 2019

¹⁰⁵ *Ibid.*

Gambar 5.6 Neraca Perdagangan Komoditas Ikan Jepang tahun 2013-2017



Sumber : Data Suhana, 2018¹⁰⁶

Defisitnya neraca perdagangan pada sektor perikanan

Jepang terlihat juga pada nilai Rasio Perdagangan Internasional (RPI) komoditas ikan yang sudah diatas $-0,5$ bahkan hampir mendekati -1 yang mana hal ini dapat diartikan bahwa neraca perdagangan Jepang pada sektor perikanan di dominasi ekspor.¹⁰⁷ Pada tahun 2017, nilai RPI komoditas ikan Jepang dengan Indonesia mencapai $-0,95$ yang berarti nilai impor hasil perikanan Jepang dari Indonesia lebih besar daripada nilai ekspor Jepang ke Indonesia, bahkan hampir 100% Jepang impor hasil perikanan dari Indonesia.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Ibid,

¹⁰⁷ Ibid,

¹⁰⁸ Ibid,

Gambar 5.7 Negara Mitra Utama Impor Hasil Perikanan Jepang



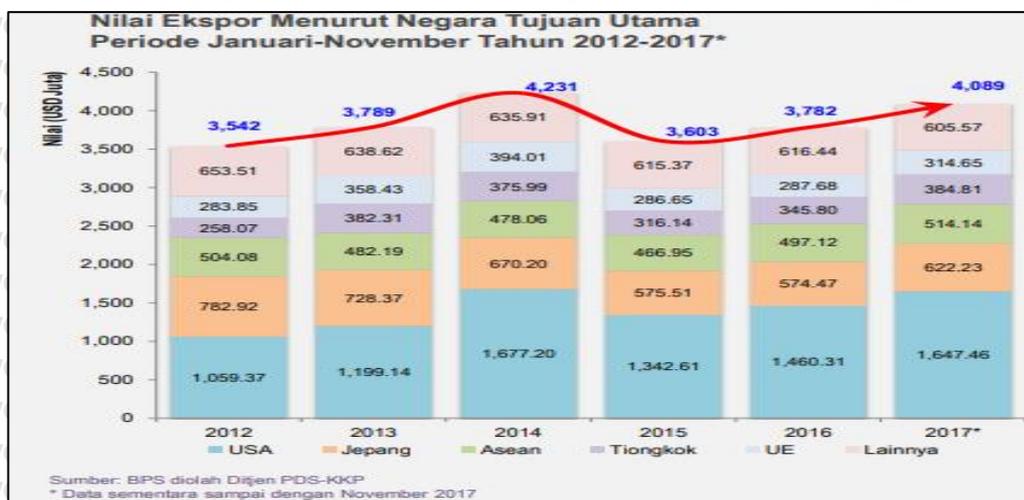
Sumber: Data Suhana, 2018¹⁰⁹

Berdasarkan data grafik diatas dapat dilihat bahwa Jepang mengimpor hasil perikanan terbanyak dari Indonesia. Hal tersebut juga terlihat pada gambar data grafik di bawah ini yang menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama hasil perikanan Indonesia.

¹⁰⁹ *Ibid.*



Gambar 5.8 Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama Periode Januari-November 2012-2017



Sumber : Website KKP¹¹⁰

Dari data gambar diatas tersebut dapat dilihat bahwa Jepang salah satu negara prioritas utama tujuan ekspor hasil perikanan Indonesia yang mengalami peningkatan 8,31% per tahunnya.¹¹¹ Jepang sendiri termasuk salah satu negara yang memiliki armada perikanan terbesar di dunia. Walaupun demikian, Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia, yaitu senilai 14 milyar Dollar AS.¹¹²

Sebagai salah satu negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia, khususnya pada hasil laut perikanan Indonesia (ikan tuna, udang) memang cukup logis apabila Jepang memberikan

¹¹⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2018, *Produktivitas Perikanan Indonesia*, diakses dari <https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2018/01/KKP-Dirjen-PDSPKP-FMB-Kominfo-19-Januari-2018.pdf> pada 5 Desember 2019, hlm. 10

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), 2008, *Fact Sheet: The international fish trade and world fisheries: The Global Fish Trade*, diakses dari <http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000850/en/fishtradefacts08b.pdf> pada 5 Desember 2019

program bantuan luar negeri dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan dan hasil laut Indonesia serta melindungi dan menjaga keanekaragaman wilayah maritim Indonesia, terutama pada 6 titik kawasan utama sasaran bantuan JICA dalam proyek pembangunan SKPT ini, yang sekaligus sebagai upaya dalam membantu perekonomian negara tersebut.

Oleh karena itu, melalui program bantuan luar negeri yang diberikan Jepang melalui JICA dalam proyek pembangun SKPT di 6 pulau terluar Indonesia ini, bantuan tersebut juga berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan secara stabil dan pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan domestik di Jepang sebagaimana pandangan JICA terhadap bantuan yang dapat meningkatkan kehidupan di negara berkembang sekaligus mencapai kepentingan masyarakat Jepang itu sendiri.

Selain itu juga, penulis melihat adanya motif Jepang untuk mendapatkan akses yang strategis atas hasil produksi laut Indonesia dapat dilihat dari alat-alat canggih yang dihibahkan oleh pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia pada proyek pembangunan SKPT ini, seperti *cold storage*, kapal-

kapal pengawas, dan pekerja-pekerja yang didatangkan langsung dari Jepang untuk mengerjakan proyek SKPT tersebut.¹¹³

Menurut penulis, hal tersebut akan membuat ketergantungan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang, dikarenakan alat-alat yang digunakan dalam proyek pembangunan SKPT tersebut berasal dari Jepang dan yang mengerjakan proyek pembangunan SKPT ini juga merupakan pekerja yang didatangkan langsung dari Jepang.

5.1.3 *Humanitarian Motives*

Meskipun dalam pemberian bantuan luar negeri suatu negara kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi suatu negara tersebut yang menjadi faktor utama dalam pemberian bantuan luar negeri, adapula faktor lain yang melandasi suatu negara dalam pemberian bantuan luar negerinya, yaitu motif kemanusiaan atau *humanitarian motives*.

Berdasarkan pada penjelasan *humanitarian motives* dalam konsep bantuan luar negeri milik David Sogge yang mengartikan bahwa suatu negara memberikan bantuan luar negeri kepada negara lain atas dasar rasa kemanusiaan. Untuk menjelaskan motif humanitarian terhadap motif Jepang dalam pemberian bantuan luar negerinya pada proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia, penulis akan

¹¹³ *Loc., Cit.* JICA

menggunakan indikator-indikator *humanitarian motives* yaitu *reducing poverty* dan *showing compassion* pada beberapa sub-bab di bawah ini.

5.1.3.1 *Reducing Poverty*

Melalui bantuan luar negeri yang disalurkan melalui JICA pada proyek pembangunan SKPT ini juga sebagai upaya pemerintah Jepang untuk mengentaskan kemiskinan, di mana bantuan yang disalurkan merupakan upaya untuk meningkatkan manajemen perikanan yang berkelanjutan sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sehingga masyarakat yang berada di sekitar proyek SKPT ini tetap memiliki akses yang baik terhadap sumber daya alam yang ada di dalamnya, sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan area SKPT tersebut, khususnya pada masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada wilayah pesisir dan laut Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, dan Biak.

5.1.3.2 *Showing Compassion*

Jepang memberikan bantuan luar negeri untuk sektor maritim khususnya pada bidang perikanan di Indonesia merupakan suatu cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi domestik di Indonesia serta upaya kontribusi langsung terhadap penanganan isu masalah pada sektor pengembangan

perikanan di Indonesia. Jepang sendiri memahami posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan potensi alam dan hasil lautnya, namun kekayaan potensi sumber daya hasil laut yang dimiliki Indonesia berbanding terbalik dengan kemampuan Indonesia dalam mengolah kekayaan hasil lautnya tersebut.

Dengan berdasarkan kondisi tersebut, Jepang menunjukkan sikap kepedulian terhadap penanggulangan dan pengembangan hasil laut Indonesia melalui proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia.

5.2 Mercantile Motives Dominan dalam Pemberian Bantuan Luar Negeri Jepang melalui JICA pada Proyek Pembangunan SKPT pada Tahun 2018

Dalam penjelasan sub-bab sebelumnya telah penulis jabarkan sedikit mengenai fakta yang berkaitan dengan motif Jepang dalam pemberian bantuan luar negerinya pada proyek pembanguna SKPT di 6 pulau terluar Indonesia menggunakan indikator-indikator dalam konsep motif bantuan luar negeri milik David Sogge. Kemudian pada sub-bab ini, penulis akan memunculkan argumen terkait motif merkantilis yang menjadi motif yang paling dominan dalam pemberian bantuan luar negeri Jepang melalui *Japan* JICA pada proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia tahun 2018.

Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan oleh penulis pada beberapa sub-bab sebelumnya, pemerintah Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri telah memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan pengelolaan terhadap sektor maritim khususnya pada bidang perikanan di Indonesia melalui bantuan teknis dalam pengembangan secara institusi terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan terbentuknya kebijakan dan peraturan dalam rangka terlaksananya proyek pembangunan SKPT tersebut. Lalu dari program bantuan tersebut, tercipta akses yang strategis terhadap pemerintah Indonesia bagi Jepang yang ditandai dengan terbentuknya kerjasama lanjutan dalam bidang yang sama, sehingga meningkatkan kolaborasi kedua negara berkaitan dengan program pengembangan manajemen maritim dan perikanan, sekaligus berbagai inisiatif baru yang berkaitan dengan keamanan sektor maritim, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Dan tidak hanya itu, pemerintah Jepang melalui program bantuan yang diberikan tersebut berusaha untuk menanamkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang diaplikasikan dalam pengelolaan sumber daya hasil laut Indonesia.

Namun dengan latar belakang bantuan JICA dan dengan beberapa bukti-bukti yang coba penulis berikan menunjukkan bahwa terdapat kepentingan-kepentingan ekonomi yang hendak pemerintah Jepang capai atas sumber daya hasil laut dan maritim Indonesia, yakni terdapat kebutuhan dari proyek pembangunan tersebut dapat menjaga kelestarian sektor perikanan dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap suplai hasil perikanan dari Indonesia ke

Jepang dengan nilai yang cukup besar. Sehingga menurut penulis sangat masuk akal bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang melalui JICA pada proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia merupakan bentuk investasi dalam mengamankan kebutuhan bagi masyarakat domestik Jepang sebagai motif utama dengan pemberian bantuan pada proyek pembangunan SKPT ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam pengolahan sumber daya hasil lautnya.

Sedangkan penulis melihat, motif lainnya tidak sedomonian motif merkantilis, karena dalam motif lainnya hanya memperkuat penjelasan dari motif merkantilis, sehingga berdasarkan sudut pandang penulis, *mercantile motives* merupakan motif yang paling dominan dari morif pemberian bantuan luar negeri Jepang melalui JICA pada proyek pembangunan SKPT Tahun 2018.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan. Bagian pertama dari bab ini yaitu kesimpulan atau hasil penelitian serta penelitian terhadap kelebihan dan kekurangan dari konsep yang digunakan. Sedangkan pada bagian kedua yaitu saran dari penulis bagi penelitian selanjutnya yang dilakukan terkait dengan tema, fenomena, dan konsep yang sama dengan penelitian ini.

6.1 Kesimpulan

Bantuan luar negeri dari Jepang melalui JICA memiliki beberapa hal yang menarik. Jepang merupakan negara donor yang menggunakan bantuan luar negeri sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan luar negerinya untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam memberikan bantuan luar negerinya, termasuk dalam bantuan luar negeri yang diberikan untuk sektor maritim perikanan pada proyek pembangunan SKPT di 6 pulau terluar Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa dalam alokasi bantuan luar negerinya, Jepang memiliki berbagai macam motif, yaitu *socio-political motives*, *mercantile motives*, dan *humanitarian motives*.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan konsep bantuan luar negeri dari David Sogge, yang memiliki berbagai variasi dalam menjelaskan motif yang dimiliki oleh negara donor dalam menyalurkan bantuan luar negeri. Melalui penulisan skripsi ini membuktikan bahwa dalam pemberian bantuan luar negeri Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam

proyek pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia tahun 2018, terdapat berbagai macam motif yang melatarbelakangi Jepang dalam pemberian bantuan luar negeri tersebut. Yang pertama adalah *socio-political startegic motives*, yaitu dengan adanya upaya pengaruh bantuan luar negeri untuk sektor maritim terhadap munculnya kebijakan pemerintah guna mendukung tercapainya tujuan dalam bantuan tersebut. Hal tersebut juga menciptakan loyalitas pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Jepang yang diwujudkan melalui terbentuknya program dan proyek lanjutan yang serupa dan berkaitan dengan bantuan untuk sektor maritim dan kelautan khususnya pada bidang perikanan di Indonesia. Serta dengan adanya penyebaran prinsip pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mementingkan peningkatan ekonomi, melainkan juga memperimbangan aspek lingkungan dan masyarakat melalui bantuan luar negeri.

Selain itu berdasarkan pada data yang sudah dijabarkan oleh penulis pada bab sebelumnya, terdapat *mercantile motives* dengan adanya keperluan dan kepentingan Jepang untuk mempertahankan peluang pasar perdagangan dan investasi serta mendapatkan akses strategis yang dimiliki oleh Indonesia. Jepang juga memiliki *humanitarian motives* dalam bantuan untuk sektor maritim dan kelautan khususnya pada bidang perikanan tersebut, karena juga berusaha memberikan proyek yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang bergantung pada kelestarian sektor maritim kelautan khususnya pada bidang perikanan di Indonesia sekaligus sebagai upaya

pemerintah Jepang untuk memberikan citra positif ke dunia internasional dalam upaya mengatasi permasalahan di Indonesia yang kurang mampu mengolah sumber daya laut dan maritimnya khususnya pada bidang perikanan yang mana hal ini dijadikan Jepang untuk menunjukkan citra positifnya atas kepeduliannya terhadap negara berkembang. Selain itu, bantuan tersebut juga mencerminkan *common interest* antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam menghadapi permasalahan pengolahan sumber daya laut dan maritimnya.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penulis berusaha untuk memberikan saran-saran terhadap penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan tema atau fokus, yaitu:

1. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada motif dari negara donor adanya bantuan yang ditujukan untuk sektor maritim-kelautan khususnya pada bidang perikanan di Indonesia. Sehingga diharapkan muncul penelitian selanjutnya dengan tema yang sama dan dengan resipien berbeda sehingga dapat menambah penjelasan motif donor dari pemberian bantuan untuk sektor tersebut,
2. Penelitian ini hanya berfokus pada melihat fenomena atau kasus dari sudut pandang donor bilateral, sehingga belum mampu menjawab secara



menyeluruh terkait pemberian bantuan untuk sektor lingkungan yang diberikan oleh organisasi bantuan multilateral, dan

3. Sebagai salah satu isu penting dalam studi hubungan internasional, penulis mengharapkan penelitian terkait isu bantuan luar negeri terutama dari fokus bantuan sektor maritim-kelautan lebih diperbanyak. Mengingat selama ini penelitian terkait bantuan luar negeri lebih banyak berfokus pada pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kharas, Homi. 2008. *The new reality of Aid*. Washington DC: Brooking Institution Press
- Lancaster, Carol. 2007. *Foreign Aid: Diplomacy, Development and Domestic Politic*. Chicago: The University of Chicago Press, diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=KwFp1jQ-1dUC&printsec=frontcover&dq=Foreign+Aid+Diplomacy,+Developm+ent,+Domestic+Politics+carol+lancaster&hl=id&sa=X&ved=0ahlUKEwiR4rKvsKnjAhUK6Y8KHeENCf4Q6AEKIKzAA#v=onepage&q=Foreign%20Aid%20Diplomacy%2C%20Development%2C%20Domestic%20Politics%20carol%20lancaster&f=false> pada 5 Juli 2019
- Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sogge, David. 2002. *Give and Take: What's the Matter with Foreign Aid*. London: Zed Books Ltd.
- Therien, Jean Philippe. 2002. *Debating Foreign Aid: Right Versus Left*. London: Taylor and Francis Ltd.

INTERNET

- Abdurohchim, M. 2017. *Sejarah Bantuan Luar Negeri Jepang Pasca Perang Dunia Ke-2*. Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12757/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> pada 20 November 2019
- Admin Biak. 2018. *Pelatihan kapasitas pegawai kelautan dan perikanan untuk mengembangkan pulau-pulau terluar Indonesia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Diakses dari <https://kkp.go.id/SKPT/Biak/artikel/6833-pelatihan-kapasitas-pegawai-kelautan-dan-perikanan-untuk-mengembangkan-pulau-pulau-terluar-indonesia> pada 7 Juli 2019

Bappenas RI. *Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-3024*. Diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/rpjmN/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf pada 27 November 2019

Data Suhana. 2018. *Melihat Perdagangan Ikan Internasional Jepang*. Diakses dari <https://suhana.web.id/2018/05/12/melihat-perdagangan-ikan-internasional-jepang/> pada 15 Desember 2019

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 2018. *Kinerja Ekspor Produk Perikanan Indonesia Tahun 2018*. Diakses dari <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/7947-kinerja-ekspor-produk-perikanan-indonesia-tahun-2018> pada 27 November 2019

Government of Japan Ministry of Foreign Affairs Economic Co-operation Bureau. *Japan's ODA Charter*. Diakses dari <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf> pada 9 Juli 2019

Japan International Cooperation Agency. 2018. *Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan*. Diakses dari https://www.jica.go.jp/publication/pamph/region/ku57pq00002izqzn-att/indonesia_development_ind.pdf pada 27 November 2019

Japan International Cooperation Agency. *Japan's ODA and JICA*. Diakses dari <https://www.jica.go.jp/english/about/oda/index.html> pada 9 Juli 2019

Japan International Cooperation Agency. *Official Development Assistance Loans: Official Development Assistance (ODA) and ODA Loans*. Diakses dari https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/overseas/index.html pada 9 Juli 2019

Kedutaan Besar Australia Indonesia. *Ikhtisar Program Bantuan Australia Untuk Indonesia*. Diakses dari <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation-programs.html> pada 18 Desember 2019

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. *Hubungan Internasional*. Diakses dari https://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_14.html pada 7 Juli 2019

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2017. *SKPT: Membangun Indonesia Dari Pinggiran*. Diakses dari <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/skpt-membangun-indonesia-dari-pinggiran-66967> pada 5 Desember 2019

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2018. *Produktivitas Perikanan Indonesia*. Diakses dari <https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2018/01/KKP-Dirjen-PDSPKP-FMB-Kominfo-19-Januari-2018.pdf> pada 5 Desember 2019

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Geografi*. Diakses dari <https://kemlu.go.id/astana/id/pages/geografi/41/etc-menu> pada 22 November 2019

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2013. *Jepang Investor Nomor Satu*. diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/6113/jepang-Investor-Nomor-Satu> pada 22 November 2019

Millenium Challenge Account-Indonesia. *Hibah Compact*. Diakses dari http://www.mca-indonesia.go.id/id/about_us/compact_grant pada 18 Desember 2019

Ministry of Foreign Affairs Japan. 2017. *White Paper on Development Cooperation: Japan's International Cooperation*. Diakses dari <https://www.mofa.go.jp/files/000406627.pdf>, pada 9 Juli 2019

Ministry of Foreign Affairs of Japan. *Japan's ODA Data by Country*. Diakses dari <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/data/index.html> pada 10 Juli 2019

Natalia, Esther Christine, 2018, *KKP Dapat Bantuan 775 M dari Jepang*, CNBC Indonesia, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180625163613-4-20377/kkp-dapat-bantuan-rp-775-m-dari-jepang> pada 14 Desember 2019

Organisation for Economic Co-operation and Development. *Net ODA*. Diakses dari <https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm> pada 9 Juli 2019

Organisation for Economic Co-operation and Development. *Official Development Assistance (ODA)*. Diakses dari <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6043> pada 5 Juli 2019

Pregiwati, Lily Aprilia. 2018. *Terima Hibah Jepang, KKP Optimalkan Pembangunan 6 SKPT di Pulau Terluar*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/5391-terima-hibah-jepang-kkp-optimalkan-pembangunan-6-skpt-di-pulau-terluar> pada 10 Juli 2019

Pusparani, Indah Gilang. 2018. *RI-Jepang Perkuat Kerjasama Maritim dan Infrastruktur*. Goodnews from Indonesia. Diakses dari

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/06/26/ri-jepang-perkuat-kerjasama-maritim-dan-infrastruktur-pada-25-November-2019>

Simorangkir, Eduardo. 2017. *RI Akan Dapat Dana Hibah Terbesar Jepang, Berapa Nilainya?*. Detik Finance. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3706578/ri-akan-dapat-dana-hibah-terbesar-jepang-berapa-nilainya-pada-9-Juli-2019>

United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). 2008. *Fact Sheet: The international fish trade and world fisheries: The Global Fish Trade*. Diakses dari <http://www.fao.org/newsroom/common/ecg/1000850/en/fishtradefacts08b.pdf> pada 5 Desember 2019

Williams, Victoria. *Foreign Aid*. Encyclopedia Britanica. Diakses dari <https://www.britanica.com/topic/foreign-aid> pada 9 Juli 2019

DOKUMEN RESMI

Badan Pusat Statistik Indonesia. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2018*. Diakses dari <https://bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NzhkNDQ5ZWVkYWFkODkyZTM4M2I3ZmQ5&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMTgvMTIvMjEvNzhkNDQ5ZWVkYWFkODkyZTM4M2I3ZmQ5L3BlbmdoaXR1bmdhbi1kYW4tYW5hbGlzaXMta2VtaXNraW5hbi1tYWtyby1kYW4taW5kb25lc2lhLXRhaHVuLTIwMTguaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0xMi0xOSAxMzoxODozMg%3D%3D> pada 18 Desember 2019

Badan Pusat Statistik. 2019. *Ekspor Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2018*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/25/2024/ekspor-ikan-segar-dingin-hasil-tangkap-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2018.html> pada 15 Desember 2019

Doksileg Dewan Perwakilan Rakyat RI. Diakses dari <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150921-113245-4176.pdf> pada 10 Juli 2019

JURNAL

Abuzeid, Farah. 2006. *Foreign Aid and the "Big Push" Theory: Lessons from Sub-Saharan Africa*. Diakses dari https://www-lb.stanford.edu/group/sjir/pdf/Aid_11.1.pdf pada 5 Juli 2019

Andersson, Maria. 2009. *Motives Behind Aid Allocation of Aid: A Case Study Regarding Swedish Motives for Aid Allocation*. Goteborgs Universitat: Sratsvetenskapliga Institutionen. Diakses dari https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24961/1/gupea_2077_24961_1.pdf pada 5 Juli 2019

Arase, David. 1995. *Buying Power: The Political Economy of Japan's Foreign Aid*. Diakses dari <https://doi.org/10.1177/03058298960250010904> pada 20 November 2019

Atahar, Syed Al. 2014. *An Assessment of Japan's ODA to Bangladesh: Changing to a New Height of Relations*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/276268923_An_Assessment_of_Japan's_ODA_to_Bangladesh_Changing_to_a_New_Height_of_Relations pada 5 Juli 2019

Bandyopadhyay, Subhayu dan E. Katarina Vermann. 2013. *Donor Motives for Foreign Aid*. Diakses dari <https://research.stlouisfed.org/publications/review/2013/09/06/donor-motives-for-foreign-aid> pada 6 Juli 2019

Berthelemy, Jean-Claude. 2005. *Bilateral Donor's Interest vs Recipients Development Motives In Aid Allocation: Do All Donors Behave The Same?*. Diakses dari <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00193273/document> pada 5 Juli 2019

Berthelemy, Jean-Claude. 2006. *Aid Allocation: Comparing donors' behaviours*. Diakses dari <https://www.regeringen.se/49bb57/contentassets/947b93ddf56e4d8d889d4115b4139fdd/jean-claude-berthelemy-aid-allocation-comparing-donors-behaviours> pada 6 Juli 2019

Bjornskov, Christian. 2013. *Types of Foreign Aid*. Aarhus University: Department of Economics and Business, diakses dari https://pure.au.dk/portal/files/53611844/wp13_08.pdf pada 5 Juli 2019

Heywood, Andrew. 2011. *Global Politics*. London: Palgrave Macmillan. Diakses dari <https://peda.net/jao/lyseo/isac/ias/global-politics/ahgp/the-whole-book:file/download/e7ab471d24086998cb255025c53dc75c3c92ed9c/Andrew-Heywood-Global-Politics%20%28kopio%29.pdf> pada 5 Juli 2019

Mayer, Wolfgang dan Pascalis Raimondos Moller. *The Politics of Foreign Aid*, University of Copenhagen: Department of Economics. Diakses dari <https://ideas.repec.org/p/kud/epruwp/99-07.html> pada 5 Juli 2019

Oh, Jinhwan dan Jisun Song. 2018. *Dual Determinants: Aid Disbursement and Volume, with Special Reference to Japan*. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1029313217301781> pada 5 Juli 2019

Randhawa, Guljinder Kaur. *Foreign Aid in Economic Development*. Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/083f/679c8dcd08096b337621fb86d3c183a05961.pdf> pada 9 Juli 2019

